

**PERSPEKTIF KRITIS JURGEN HABERMAS DALAM RESOLUSI
KONFLIK SEPARATISME PAPUA MELALUI *CRITICAL DISCOURSE*
ANALISYS**

(Tesis)

Oleh

**DILLA JANU ISTANTI
NPM. 1826021017**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

**PERSPEKTIF KRITIS JURGEN HABERMAS DALAM RESOLUSI
KONFLIK SEPARATISME PAPUA MELALUI *CRITICAL DISCOURSE*
ANALISYS**

Oleh :

DILLA JANU INSTANTI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PERSPEKTIF KRITIS JURGEN HABERMAS DALAM RESOLUSI KONFLIK SEPARATISME PAPUA MELALUI *CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS*

Oleh

DILLA JANU ISTANTI

Resolusi konflik Papua melalui berbagai kebijakan belum mampu mengantarkan Papua menuju kondisi damai. Penelitian ini bertujuan menawarkan pendekatan berbeda dalam resolusi konflik Papua melalui pemikiran Habermas dengan menggunakan *the theory of communicative action*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui *critical discourse analysis* Norman Fairclough. Gagasan utama pemikiran Habermas menitikberatkan pada komunikasi intersubjektif dan mengkritisi komunikasi instrumental dalam mencapai sebuah kesepakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah masih kerap melakukan penyelesaian konflik Papua dengan menggunakan komunikasi instrumental. Praktik diskursif yang muncul masih memperlihatkan dominasi kekuasaan dalam penyelesaian konflik. Hal ini terlihat dari pidato presiden yang secara tegas memerintahkan TNI Polri untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok separatisme dalam merespon konflik akibat penyerangan para pekerja Trans-Papua dan pers release resmi pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD yang menetapkan KKB Papua sebagai terorisme. Resolusi konflik yang dilakukan belum sampai pada titik komunikatif. Tindakan komunikatif yang digagas Habermas melalui komunikasi intersubjektif dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik Papua.

Kata kunci : *communicative action*, resolusi konflik, Papua.

ABSTRACT**PERSFEKTIF KRITIS JURGEN HABERMAS DALAM RESOLUSI
KONFLIK SEPARATISME PAPUA MELALUI *CRITICAL DISCOURSE*
*ANALYSIS*****By****DILLA JANU INSTANTI**

Resolution of the Papuan conflict through various policies has not been able to bring Papua to a peaceful condition. This study aims to offer a different approach in Papua conflict resolution through Habermas's thinking by using the theory of communicative action. The research method used is qualitative through the critical discourse analysis of Norman Fairclough. The main idea of Habermas's thinking focuses on intersubjective communication and criticizes instrumental communication in reaching an agreement. The results of the study show that the government still often resolves the Papuan conflict by using instrumental communication. The emerging discursive practice still shows the dominance of power in conflict resolution. This can be seen from the president's speech which explicitly ordered the TNI and Polri to pursue separatist groups in response to the conflict due to attacks by Trans-Papuan workers and the government's official press release through the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Mahfud MD which declared the Papuan KKB as terrorism. Conflict resolution has not yet reached a communicative point. The communicative action initiated by Habermas through intersubjective communication can be an alternative for resolving the Papuan conflict.

Keywords: communicative action, conflict resolution, Papua

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PERSFEKTIF KRITIS JURGEN HABERMAS
DALAM RESOLUSI KONFLIK SEPARATISME
PAPUA MELALUI *CRITICAL DISCOURSE
ANALYSIS***

Nama Mahasiswa : **Dilla Janu Istanti**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1826021017**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




1. Komisi Pembimbing


Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP. 196405081993031004


Arizka Warganegara, Ph.D.
NIP. 198106202006041003

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 196010101986031006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. R. PitojoBudiono, M.Si.**

Sekretaris : **Arizka Warganegara, Ph.D.**

Penguji
BukanPembimbing : **Dr. Tabah Maryanah**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 12 November 2021

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 05 Desember 2021

Yang membuat Pernyataan



Dilla Janu Istanti

NPM. 1826021017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Martapura pada tanggal 29 Januari 1991. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Pasangan bapak Siswoyo dan Ibu Hartutik dengan dua adik Bernama Hariyanto Medi Saputra dan Dina Permata Sari. Penulis menempuh pendidikan formalnya di SDN Bandar Sari pada tahun 1996-2002, SMP N 1 Bandar Sari tahun 2002-2005, dan SMA N 1 Martapura pada tahun 2005-2008.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Gadjja Mada dengan mengambil jurusan Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2008-2012. Pada tahun 2008-2021 penulis kembali melanjutkan pendidikan program Pascasarjana dengan mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan konsentrasi Managemen Pemerintahan di Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:

- 1. Keluargaku : mamak dan adik**
- 2. Almamaterku: Universitas Lampung**

MOTTO

“Man Jadda Wa Jada.”

(barang siapa bersungguh-sungguh pasti mendapatkannya)

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah hadir di muka bumi untuk memberikan cahaya dan teladan dalam mencapai kebenaran.

Tesis dengan judul **“Prespektif Kritis Jurgen Habermas dalam Resolusi Konflik Separatisme Papua melalui *Critical Discourse Analysis* ”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya yang luar biasa atas limpahan karunia dan rizki. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah.
2. Kepada Ibu Dra. Ida Nurhaida., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Kepada Bapak Hertanto, m.Si. Ph. D., selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini. Semoga bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
5. Kepada Bapak Ariza Warga Negara Ph. D., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan-masukan dalam proses tesis ini.
6. Kepada Ibu Dr. Tabah Maryana, M. Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini sampai selesai dengan baik. Semoga Ibu dan keluarga

selalu dalam penjagaan Allah dan dipenuhi dengan limpahan kebaikan dari Allah.

7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga semua ilmu dan kebaikan Bapak Ibu semua menjadi catatan baik di sisi Allah SWT.
8. Kepada mamak terimakasih atas semua do'a, tanpa do'a orang tua penulis tak akan sampai pada titik ini. Terimakasih atas semua semua didikan yang diberikan penulis sejak penulis kecil bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu pemutus rantai kebodohan, rantai kemiskinan dan akan mengantarkan pada kemuliaan.
9. Teruntuk adek laki-laki ku tercinta, Hariyanto Medi Saputra. Terimakasih untuk semua dukungannya. Terimakasih untuk semua ketegasannya. Terimakasih untuk semua tanggung jawab dan penjagaannya. Terimakasih sudah menjadi laki-laki terbaik yang pertama kali penulis kenal. Terimakasih karena tak hanya sekedar menjadi adik, tapi juga kakak dan terkadang juga menjadi sosok Bapak. Terimakasih atas kepercayaannya kepada penulis untuk sampai pada tahap ini. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu hal baik yang penulis berikan untuk keluarga kita.
10. Teruntuk adik iparku Elvayanti, terimakasih untuk semua kedewasaan, kesabaran dan pengertiannya selama ini.
11. Untuk Mas Beta Heksa Putra. Dipenghujung perjalanan menyelesaikan ini, Allah izinkan engkau melengkapi semua cerita ini. Terimakasih sudah menjadi sumber energiku, penyemangatku, dan menjadi salah satu alasan untuk menyelesaikan tesis ini dengan cepat. Hari ini satu langkah kita lebih maju untuk berjalan menuju semua cita dan asa yang akan kita bangun. Semoga Allah memudahkan kita, Allah baikkkan, dan Allah segerakan. Kamu ada dalam semua semogaku.
12. Teruntuk sahabat terbaikku, Anita ferbriani, Isnanini Nurul fajri, Netty Ariyani. Terimakasih atas semua kebersamaan dalam semua keadaan.

Terimakasih telah memberikan warna dengan penuh cinta dan air mata.
Terimakasih kalian ku, aku sayang kalian.

13. Teruntuk teman-teman kuliah di MIP, Bang Arif, Bang talib, Rendi, Lutfi, Agus, Lusita Angelina, Shintya Gugah, Ponco Wibowo, Bang Adi, Adi Nurjana, Bang Isnain, Bang Cecep, dan seluruh teman-teman Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian dalam kerja-kerja intelektual. Semoga mimpi-mimpi kita dapat terwujud.
14. Kepada Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih untuk semangat dan bantuan yang telah diberikan.
15. Terakhir untuk pembaca tesis ini, semoga bermanfaat dan ada kebaikan bagi pembaca.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2020

Penulis

Dilla Janu Istanti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Teori Kritis Jurgen Habermas	16
1. Sketsa Biografis Jurgen Habermas.....	19
2. Konflik dalam Perspektif Kritis Jurgen Habermas	24
3. Management Konflik dalam Kerangka Teori Kritis Jurgen Habermas	26
a. Tindakan Komunikasi Aktif Jurgen Habermas	27
1. <i>Type of Action</i> Jurgen Habermas.....	34
2. <i>Validity of Clims</i> Jurgen Habermas.....	36
C. Kerangka Berfikir	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	40
B. Focus Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43

E. Teknik Analisis Data.....	45
------------------------------	----

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Papua	50
B. Konflik Separatisme Papua	52
C. Sejarah Gerakan Separatims OPM.....	54
D. Struktur Organisasi Papua Merdeka (OPM)	57
E. Peta Serangan Gerakan Separatisme Papua.....	60
F. Pendekatan Operasi Militer Pemerintah Indonesia.....	63
G. Pendekatan Otonomi Khusus	65

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough	69
1. Pidato Presiden Jokowi Tanggapi Penembakan Pekerja Trans-Papua	70
2. Pers Relase Pemerintah melalui Pernyataan Mahfud Soal KKB Organisasi Teroris Hingga Status Papua Adalah NKRI.....	92
B. Habermas, Komunikasi, dan Penyelesaian Konflik.....	134
C. Rekomendasi Kebijakan atas Resolusi Konflik Separatisme Papua	146
1. Pendekatan Dialogis untuk Memahami Resolusi Konflik Papua: Perluasan Teori habermas tentang Tindakan Komunikasi	146
2. <i>International Soft Power Diplomacy</i>	150
3. Pendekatan Pembangunan Infrastruktur	152
4. Resolusi Komunikatif Habermas.....	153

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	158
B. Saran	160

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tebel 1. <i>Type of Action</i> Jurgen Habermas	34
Tebel 2. Pidato Presiden Jokowi	89
Tebel 3. Pers Relase Pemerintah melalui Pernyataan Mahfud MD	126
Tebel 4. Pembangunan Jalan Trans-Papua.....	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Validity of Clims</i> Jurgen Habermas	37
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	39
Gambar 3. Model Analisis Wacana Kritis Fairclough	46

DAFTAR SINGKATAN

MIFEE	: <i>Merauke Integrated Food and Energy Estate</i>
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
ULMWP	: <i>United Liberation Movement for West Papua</i>
CDA	: <i>Critical Discourse Analysis</i>
BPS	: Badan Pusat Statistik
SKPKC FP	: Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua
MRP	: Majelis Rakyat Papua
KKB	: Kelompok Kriminal Bersenjata
Pepera	: Penentuan Pendapat Rakyat
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNTEA	: <i>United Nations Temporary Executive Authority</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Polri	: Polisi Republik Indonesia
OMP	: Operasi Militer untuk Perang
OMPS	: Operasi Militer Selain Perang
Otsus	: Otonomi Khusus
BIN	: Badan Inteligent Negara
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Inpres	: Instruksi Presiden
WPNA	: <i>West Papua National Authority</i>
WPNCL	: <i>West Papua National Coalition for Liberation</i>
KNPB	: Komite Nasional Papua Bara
MSG	: <i>Melanesia Spearhead Group</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Papua merupakan daerah dengan keunikan tersendiri. Tak hanya tampilan fisik ras melanesia yang berbeda dengan ras melayu pada umumnya, tetapi juga kesadaran tentang ke-Indonesiaan yang berbeda. Orang Papua dianggap memiliki nasionalisme ganda, Papua dan Indonesia. Nasionalisme ganda bukanlah istilah sub-versif, tetapi istilah historis yang menunjukkan watak perjalanan nasionalisme di Papua. Nasionalisme Papua dikonstruksi oleh Belanda sejak awal abad 19 dan nasionalisme Indonesia diperkenalkan oleh orang-orang Indonesia sejak 1945. Istilah nasionalisme ganda di Papua dapat dipahami sebagai istilah historis yang berfungsi sebagai alarm kepada pemerintah (pusat) agar melibatkan Papua dalam proyek bersama nasionalisme Indonesia. Sejak ‘menjadi Indonesia’ orang-orang Papua selalu merasa asing, kehilangan diri sebagai bangsa dan menjadi ‘anak tiri’ dari sistem politik dan pembangunan di Indonesia (Saprilah, 2019).

Nasionalisme Indonesia hingga 1962 dimana titik politik Papua terintegrasi menjadi bagian dari Indonesia sangat lemah. Hal ini dikarenakan faktor politik Belanda yang dinilai lebih baik menempatkan identitas ke-Papuaan melalui berbagai mekanisme dan strategi kebudayaan, sedangkan nasionalisme Indonesia disemaikan dengan cara yang sporadis. Akibatnya, proses integrasi Papua ke Indonesia tidak serta merta menghilangkan nasionalisme Papua yang telah dikonstruksi oleh Belanda hingga lahirnya nasionalisme ganda (Saprilah, 2019). Hal ini yang menjadi cikal bakal terjadinya konflik di Papua. Konflik di Papua sudah mulai terjadi sejak awal mula terintegrasinya Papua menjadi bagian dari Indonesia.

Konflik di Papua terus terjadi dari waktu ke waktu hingga sampai pada konflik separatisme. Konflik ini melibatkan negara dengan kelompok separatisme yang melakukan pemberontakan. Kelompok separatisme melakukan pemberontakan kepada negara untuk menuntut kemerdekaan atas tanah Papua. Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok separatisme ini menamai gerakan mereka dengan istilah OPM (Organisasi Papua Merdeka).

OPM memulai perlawanan bersenjata semenjak pertengahan tahun 1960. Pada awal pergerakannya, dukungan masyarakat lokal terhadap OPM relatif sangat terbatas. Sekitar tahun 1970 setelah Freeport beroperasi mendulang emas dan bahan tambang lainnya di pegunungan Grasberg, popularitas dan dukungan terhadap OPM dari masyarakat lokal pun meningkat. Pemerintahan sentralistik dan pendekatan keamanan yang diterapkan oleh rezim Orde Baru tidak dapat menyelesaikan konflik di Papua, bahkan semakin memperdalam ketertindasan dan rasa permusuhan (Martanto, 2007). Konflik di Papua terus terjadi dari waktu ke waktu dan tak kunjung usai.

Astri(2011) menjelaskan bahwa konflik di Papua semakin merebak disebabkan oleh banyak hal, seperti sulitnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan, ketimpangan hukum, dan pelanggaran hak-hak yang pro-rakyat sehingga semakin melebarkan kesenjangan sosial yang terjadi. Konflik di Papua juga terjadi dikarenakan lemahnya manajemen pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah pusat maupun daerah. Permasalahan lain yang kompleks seperti stigmatisasi OPM, kurang profesionalnya birokrat lokal dan masuknya kapitalis global yang tidak memihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat Papua(Tippe, 2013).Kesenjangan sosial yang terjadi berakibat pada munculnya konflik yang menuntut kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Pergolakan terus terjadi di tanah Papua. Konflik yang terjadi merupakan konflik berkepanjangan dari dulu hingga saat ini. Kelompok separatisme bersenjata melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Konflik separatisme yang terjadi di Papua dipicu oleh banyak hal, seperti kemiskinan,

eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial, dan beberapa hal lain. Wilayah Papua yang berada pada wilayah paling ujung timur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini sangat rentan terjadi gerakan separatis yang melawan Pemerintah Pusat.

Konflik di Papua sudah berlangsung sejak lama sekali. Pada tahun 2005 pernah terjadi demonstrasi berdarah di Jayapura yang menuntut penutupan tambang tembaga dan emas Grasberg Freeport Indonesia. Konflik di Papua sudah mulai terjadi sejak dilakukannya ekstraksi tambang emas *open-pit* terbesar di dunia oleh perusahaan pertambangan milik Amerika Serikat, Freeport (Martanto, 2007).

Pada tahun 2016 di kota Yogyakarta juga pernah terjadi konflik berbalut rasialisme. Para mahasiswa Papua ditangkap paksa, asramanya dikepung oleh organisasi masyarakat dan seorang mahasiswa dikriminalisasi. Kejadian tersebut bermula dari mahasiswa Papua di Yogyakarta yang tergabung dalam Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat akan menyuarakan aspirasinya di jalan dan mendukung ULMWP bergabung dalam *Melanesian Spearhead Group*. Ratusan personel kepolisian sudah mengepung asrama tersebut sebelum long march dilakukan. Mahasiswa didorong masuk ke dalam asrama. Jalan yang menjadi akses untuk menuju lokasi aksi pun diblokir. Tak hanya itu, pintu gerbang dan pintu belakang asrama di blokade truk polisi (Lubabah, 2016).

Konflik di tanah Papua kembali menyeruak. Akhir-akhir ini pemberitaan di media massa dijejali dengan merebaknya kembali konflik. Kerusuhan terjadi di banyak tempat di tanah Papua. Kerusuhan terjadi karena adanya pemberontakan oleh kelompok-kelompok separatisme bersenjata yang menamai gerakan mereka sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka). Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah istilah umum bagi gerakan pro kemerdekaan Papua. Gerakan ini pada mulanya adalah gerakan yang merupakan reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia sejak 1963.

Gerakan ini melakukan perlawanan secara bersenjata pertama kali diluncurkan di Manokwari pada 26 Juli 1965.

Konflik di Papua semakin tereskalasi dalam skala yang lebih besar hingga terjadi kerusuhan di banyak tempat saat terjadi penghinaan yang dianggap rasial yang dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa Papua di Surabaya (Rahman, 2019). Kejadian ini menjadi pemicu merebaknya pergolakan di banyak tempat di Papua. Konflik di Papua seolah menjadi konflik yang tak berujung (Arnani, 2019).

Kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa seolah sulit dikendalikan. Kasus rasisme terhadap Mahasiswa Papua berujung pada jalan diblokir, gedung DPRD dibakar, pohon di tepi jalan ditebang, ban dibakar hingga melumpuhkan aktivitas dan mobilitas warga. *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)*, organisasi payung untuk gerakan politik kemerdekaan Papua, mencatat polisi menangkap sebanyak 226 mahasiswa Papua pada saat demo 14-18 Agustus 2019. Lokasi demo tersebut berada di Jayapura, Maluku, Surabaya, dan Malang. Personil Brimob melancarkan 23 kali tembakan gas air mata ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada kasus tersebut. Sekitar 43 mahasiswa Papua di asrama ditangkap paksa dan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Widhana, 2019).

Pada 15 Agustus 2019 di Malang, bentrok terjadi antara mahasiswa Papua dan kelompok ormas. Akibatnya, 23 mahasiswa Papua terluka. Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang itu melakukan aksi politik damai. Mereka memperingati Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 antara pemerintah Indonesia dan Belanda tahap internasional perdana yang dianggap oleh orang Papua sebagai pintu masuk Papua bergabung Indonesia pada 1969. Namun, aparat keamanan maupun ormas di Indonesia mengabaikan hukum internasional itu, yang telah diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Hal itu terikat dalam kovenan hak-hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU 12/2005. Singkatnya, kebebasan pendapat politik

mahasiswa-mahasiswa Papua yang dilakukan secara damai itu, telah diacuhkan oleh aparat keamanan Indonesia lewat tindakan-tindakan represif (Widhana, 2019).

Konflik di Papua hingga saat ini masih terus terjadi dengan berbagai macam isu yang melarbelakangi. Jika ditelisik dengan cermat sebenarnya konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua pada dasarnya disebabkan oleh limpahan sumber daya alam yang besar tetapi tidak dapat menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Ekstraksi sumber daya alam dalam jumlah yang besar terdiri atas pertambangan, penebangan kayu dan perikanan illegal, perkebunan swasta yang besar sekali dan masih banyak sumber daya lain.

Papua memiliki wilayah tambang emas terbesar di dunia, minyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan besar-besaran terkait program *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) juga tidak membawa kemajuan yang berarti bagi rakyat Papua. Proyek MIFEE merupakan upaya pemerintah untuk menjadikan Merauke sebagai pusat pangan. Proyek ini pengembangan produksi pangan dan energi yang dilakukan secara terintegritas mencakup pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan (Yanuarti, 2012).

Upaya pemerintah ini tidak berhasil karena yang terjadi justru mega proyek perkebunan di Kabupaten Merauke membuat kelangsungan hidup masyarakat adat terancam. Hutan yang menjadi tempat mereka mencari makan dikonversi dengan cara tidak adil menjadi lahan perkebunan. Pohon sagu yang menjadi sumber makanan sudah ditebang dan hewan untuk berburuh sudah hilang. Warga justru mengalami kesulitan untuk mencari makan. Kekayaan alam yang melimpah justru menuai terjadinya konflik karena ada eksploitasi sumber daya alam yang tidak menghasilkan keadilan dan pemerataan distribusi atas hasil pengelolaan kekayaan alam (Yanuarti, 2012).

Rakyat Papua masih terus berada dalam lingkaran kemiskinan, tingkat pendidikannya rendah, angka buta huruf tinggi, tingkat kesehatan juga masih

relatif rendah. Kondisi Papua yang lebih buruk dari pada wilayah lain Indonesia inilah yang menjadi pemicu merebaknya konflik di Papua.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, Bagas Susilo menyatakan bahwa tiga provinsi di kawasan timur Indonesia dengan persentase penduduk miskin terbesar adalah Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Angka kemiskinan di Papua 26,55%, Papua Barat 21,51% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 20,62 persen (Suwandi, 2020). Papua dan Papua Barat masih menempati angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Angka kemiskinan di Papua tidak sebanding dengan hasil sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam Papua sangat melimpah tetapi tidak diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya.

Data tingkat pendidikan di Papua juga masih sangat rendah. Berdasarkan Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2018 masih terdapat anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 2,21%. Angka ini lebih tinggi di jenjang SMP/ sederajat yakni 6,05% dan SMA/ sederajat sebesar 5,41%. Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat meningkat dari 2017 masing-masing sebesar 4,95% dan 4,23%. Alasan tertinggi penduduk di Provinsi Papua usia 5-24 tahun yang belum pernah atau tidak bersekolah lagi adalah karena tidak ada biaya, yaitu sebesar 22,66%. Alasan kedua karena belum cukup umur, yang dirasakan kelompok umur 5-6 tahun, sebesar 22,11%. Alasan ketiga disebabkan fasilitas sekolah yang jauh, yaitu sebesar 13,52%. Alasan selanjutnya karena bekerja atau mencari nafkah sebanyak 12,73% (Jayani, 2019). Tingkat pendidikan yang rendah juga mengakibatkan Papua berada dalam kondisi ketertinggalan dalam banyak hal. Hal ini juga menyebabkan pemicu terjadinya konflik di Papua.

Tingkat kesehatan di Papua juga masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP) menyebut kondisi kesehatan di Papua tak mengalami perubahan signifikan dalam 20 tahun terakhir. Hal itu diketahui dari laporan *Memoria Passionis* (Ingatan atas Penderitaan) yang telah

menyentuh edisi ke-37 sejak pertama kali terbit tahun 1999. Pada seri *Memoria Passionis* seri pertama sampai seri tiga puluh tujuh, menariknya situasi kesehatan tidak ada perubahan. Kasus gizi buruk tetap ada dari seri pertama tahun 1999 sampai terakhir 2019," kata Direktur SKPKC FP Yuliana Languwuyo di Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat (15/11/2019). Laporan *Memoria Passionis* edisi 37 sendiri berisi catatan kelam hak asasi manusia di Papua pada tahun 2018. Laporan pertama yang disampaikan ialah soal gizi buruk dan campak di Asmat pada 2018. Setidaknya 71 orang tewas akibat tragedi tersebut. Angka itu berdasarkan catatan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Kesukuan Agats pada September 2017-Januari 2018 (Bernie, 2019).

Beberapa hal yang telah dipaparkan diatas menjadi pemicu terjadinya konflik di Papua. konflik yang terus terjadi berkepanjangan tak kunjung usai hingga konflik yang terus tereskalasi dalam skala besar hingga berujung pada konflik separatisme di tanah papua. Konflik yang berkepanjangan harus segera diselesaikan agar tidak semakin tereskalasi dalam skala besar. Manajemen konflik sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian konflik. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dituntut untuk melakukan manajemen konflik agar konflik yang muncul dapat diarahkan pada hal yang positif dan tidak sampai tereskalasi secara besar. Managemen konflik diperlukan agar konflik tidak berkepanjangan dan tereskalasi ke dalam konflik yang lebih besar serta dapat diselesaikan dengan baik perlu dilakukan oleh Pemerintah.

Pendekatan yang kerap digunakan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua hingga kini yang masih terus dilakukan ialah penyelesaian dengan menggunakan pendekatan militer. Hal ini kembali terlihat pada saat terjadi kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, 16 Agustus 2019 lalu menuai protes besar-besaran mengemuka di Jayapura, Manokwari, Mimika, Sorong, Fakfak, Nabire, Deiyai dan daerah-daerah lain. Protes yang dilakukan ini semakin besar dan berujung pada tindak kekerasan yang terjadi dimana-mana. Pemerintah Indonesia merespon dengan langkah pengamanan.

Pemerintah mula-mula melakukan pelambatan lantas memblokade akses internet. Tak cukup samai disitu, pemerintah Indonesia mengirim penambahan personel keamanan ke Papua.

TNI-Polri mengirimkan sekitar 2.529 personel ke wilayah Papua pada 21-30 Agustus. Penambahan aparat keamanan itu pertama kali dikerahkan sesudah aksi di Mimika. Sebanyak 100 pasukan diambil dari Batalyon 754 untuk ditempatkan ke Kodim 1710 Mimika. Pada 23 Agustus, Polri menempatkan setidaknya 1.200 personel khusus di Sorong, Fakfak, dan Manokwari. Kapolri Tito Karnavian menambah 300 personel Polri menuju Deiyai dan Paniai. Polda Kalimantan Timur juga mengirimkan satu batalion polisi yang berjumlah sekitar 600 personel ke Papua. Pada hari yang sama, TNI menambah 300 personel ke Manokwari dan Sorong serta 329 personel ke Jayapura (Garnesia, 2019). Kultur kekerasan dan militeristik di era reformasi ini seolah masih kental digunakan pemerintah dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Militer seolah menjadi senjata utama dalam penyelesaian konflik. Saat timbul gejolak di Papua yang baru-baru ini terjadi, pemerintah langsung menurunkan pasukan militer dengan jumlah yang cukup besar.

Sugiandi (2008, p. 12) pendekatan keamanan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat menunjukkan tingkat rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan prasangka terhadap penduduk non-Papua. Hal ini terlihat dari keberadaan personil militer yang berlebih. Kehadiran militer di Papua begitu kuat. Saat ini begitu banyak tentara yang ditugaskan di Papua daripada di tempat-tempat lain. Keberadaan militer Indonesia masih membentuk ketidaknyamanan di kalangan penduduk asli Papua.

Penyelesaian konflik yang ada di Papua telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Tulisan ini fokus pada kajian terkait dengan alternatif pendekatan yang memungkinkan untuk dilakukan dalam resolusi konflik separatisme Papua. Kajiannya akan ditekankan pada pendekatan teori kritis Jürgen Habermas dalam perspektif *the theory of communicative action* melalui *critical*

discourse analysis Norman Fairclough. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini selain fokus pada perspektif kritis Jurgen Habermas juga akan memberikan analisis wacana kritis resolusi konflik yang selama ini telah dilakukan Pemerintah, sehingga memungkinkan untuk memberikan wacana baru terkait alternatif resolusi konflik yang memungkinkan dilakukan melalui tindakan komunikasi aktif yang ditawarkan dalam perspektif kritis Jurgen Habermas.

Tesis ini mengkaji pendekatan yang memungkinkan untuk dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik di Papua ialah melalui tindakan komunikatif. Teori kritis Habermas melihat pentingnya suatu tindakan komunikatif dari pemerintah (negara) kepada pihak-pihak yang berkonflik di Papua untuk mencapai jalan damai. Argumentasi ini dibangun dengan menggunakan analisis teori kritis Jurgen Habermas dalam Teori Tindakan Komunikatif dan dilakukan analisa melalui *critical discourse analysis*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana perspektif kritis Jurgen Habermas dalam resolusi atas konflik separatisme yang terjadi di Papua?

C. Tujuan Penelitian.

1. Mengetahui perspektif kritis Jurgen Habermas dalam menawarkan resolusi atas konflik separatisme yang terjadi di Papua
2. Memberikan alternatif rekomendasi kebijakan yang memungkinkan untuk dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik di Papua.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami konflik yang tengah terjadi di Papua melalui perspektif Jurgen Habermas.
- b. Menambah pustaka ilmiah terkait kajian akademis dalam studi penyelesaian konflik.

2. Manfaat Praktis

Menawarkan alternatif pendekatan yang memungkinkan untuk dilakukan pemerintah (negara) kepada pihak-pihak yang berkonflik di Papua untuk mencapai jalan damai.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Studi Yanuarti (2012) konflik di Papua terjadi akibat dari pengelolaan sumber daya alam. Konflik muncul sebagai akibat arogansi negara dan kesewenangan perusahaan nasional maupun swasta asing dalam mengeksploitasi sumber daya alam dengan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil sumber daya alam. Pemerintah melakukan eksplorasi minyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan melalui program MIFEE. Hal tersebut pada kenyataannya tidak membuahkan hasil dan membawa kemajuan yang berarti bagi masyarakat Papua.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam penanganan konflik yang terjadi di Papua belum melibatkan masyarakat adat secara menyeluruh. Masyarakat adat belum diberikan ruang-ruang untuk menjelaskan kearifan lokal dan mengarahkan tingkat kemajuan yang diinginkan sesuai dengan kearifan lokal tersebut. Inisiatif lokal seharusnya bekerja guna mencapai kebijakan sumber daya alam yang seimbang dengan menghargai penduduk asli Papua dan lingkungan pada tingkat makro. Koordinasi antara MRP (Majelis Rakyat Papua) dan pemerintah Provinsi untuk mempersiapkan proyek percobaan mengenai pemecahan masalah masalah tanah adat. MRP merupakan sebuah lembaga yang ada di provinsi Papua yang beranggotakan penduduk asli Papua perlu dilakukan. MRP memiliki kedudukan setara dengan DPRD. MRP berfungsi sebagai lembaga yang merepresentasikan kultur orang asli Papua. Pemerintah harus berkonsultasi dengan para pemimpin daerah mengenai rancangan peraturan daerah tentang badan perwakilan desa rancangan

peraturan daerah mengenai pemetaan tanah adat di Papua dan hal hal yang berbasis masyarakat.

Penelitian tersebut hanya berfokus pada konflik yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam. Rekomendasi penanganan konflik yang diberikan pada penelitian tersebut berupa kebijakan sumber daya alam yang seimbang dengan melibatkan masyarakat adat secara menyeluruh dan menghargai penduduk asli Papua untuk mengarahkan kemajuan sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena akan mengkaji resolusi konflik separatism Papua sebagai konflik terbesar dan bekepanjangan yang terjadi di Papua.

Studi lain dilakukan oleh Bhakti & Pigay (2012) menggambarkan dan menganalisis akar permasalahan di Papua dikarenakan kondisi sosial dan ekonomi yang buruk. Konflik juga terjadi karena beberapa aspek, diantaranya ialah konflik antara militer dan beberapa orang Papua. Konflik tersebut masih menyisakan traumatis diantara orang Papua khususnya mereka yang memiliki pengalaman dengan kultur militer yang represif terhadap orang Papua. Kondisi sosio ekonomi di Papua juga mengakibatkan sikap skeptis di antara orang Papua terhadap Pemerintah Pusat. Strategi pemecahan masalah dan konflik yang mengakar tersebut pada studi ini menawarkan untuk dilakukan melalui Unit Kerja Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat UP413. Percepatan pembangunan perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas rakyat Papua dalam urusan birokrasi dan ekonomi.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam melihat pendekatan militer yang kerap digunakan Pemerintah dan penyelesaian konflik di Papua. Perbedaannya terletak pada strategi pemecahan konflik yang ditawarkan. Penelitian terdahulu menawarkan pemecahan konflik melalui percepatan pembangunan, sementara pada penelitian ini penyelesaian konflik yang ditawarkan melalui pendekatan tindakan komunikasi aktif Jürgen Habermas.

Studi tentang penyelesaian konflik di Papua juga dilakukan Syarif el al.,(2018) melalui pengkajian model pemberdayaan masyarakat. Model pemberdayaan masyarakat dilakukan di kawasan rawan konflik dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Model pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan bertani lebih produktif. Bertani dalam rangka menyediakan kebutuhan dasar serta upaya pengembangan usaha melalui kemitraan, dengan pemerintah, perusahaan, dan lembaga keagamaan. Studi ini juga menganggap bahwa selama ini penyelesaian konflik yang dilakukan di Papua selama ini masih menggunakan pendekatan represif.

Penelitian terdahulu menawarkan penyelesaian konflik Papua melalui model pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sampai hari ini belum mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua jika kelompok separatis yang menuntut kemerdekaan atas Papua belum mampu diselesaikan. Penyelesaian konflik antara Pemerintah dan kelompok separatis perlu dilakukan terlebih dahulu. Penelitian ini akan menawarkan resolusi konflik melalui perspektif kritis Jurgen Habermas dalam kerangka teori tindakan komunikasi aktif.

Studi serupa pernah dilakukan dengan judul Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua Tahun 2014-2019. Penelitian tersebut menunjukkan hasil penelitian bahwa kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam mengupayakan dialog atas penyelesaian konflik vertikal Papua memiliki tantangan. Paradigma dialog yang mengalami miskonsepsi, dimana dialog sebagai konsep dan pendekatan yang belum dipahami secara tepat, dan faktor yang memengaruhi upaya dialog atas resolusi konflik vertikal di Papua belum berhasil dimana sejarah integrasi dan identitas, kekerasan politik, kegagalan pembangunan, dan marginalisasi orang Papua sebagai akar masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah. Penelitian terdahulu melihat perlunya konsolidasi kembali lembaga-lembaga negara yang berjalan secara soliter dan inkonsisten

dalam pemahaman dialog yang tidak bias. Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga perlu memiliki strategi utama jangka panjang dalam membuat proyeksi berbagai aspek dan dimensi yang memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lain agar selaras dan tidak terfragmentasi (Nugroho & Sardini, 2019). Perbedaannya dengan penelitian ini bahwa pemahaman dialog yang tidak bias akan dilihat melalui perspektif kritis Jürgen Habermas dalam kerangka tindakan komunikasi aktif.

Studi untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian konflik Papua juga pernah dilakukan. Rekomendasi tersebut diantaranya ialah: Pertama, melakukan pembatasan luas, intensitas dan keterbukaan konflik politik di tanah Papua secara persuasif. Kedua, menyelesaikan konflik politik di tanah Papua secara institusional melalui lembaga-lembaga negara yang ada, diantaranya pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Rakyat Papua. Ketiga, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat melanggar Hak Asasi Manusia, hukum dan perundangan yang berlaku. Keempat, menciptakan stabilitas konsensual. Kelima, menghasilkan resolusi konflik dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Studi ini menyimpulkan bahwa ternyata sebagian besar kebijakan diambil oleh pemerintah sejak periode Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi masih jauh dari harapan. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan menganalisis pola, arah dan efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintahan (Mambraku, 2015).

Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal resolusi konflik Papua. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus resolusi konflik yang ingin dicapai. Penelitian ini akan menekankan pada resolusi konflik separatism melalui pendekatan tindakan komunikasi aktif Jürgen Habermas.

Penelitian lain terkait resolusi konflik Papua pernah dilakukan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Negosiasi menjadi pilihan terbaik Pemerintah Indonesia untuk resolusi konflik di Papua. Penelitiannya memahami proses

negosiasi konflik Papua terkait aktor, tuntutan dan proses negosiasi dengan menggunakan teori negosiasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi konflik Papua melibatkan aktor internal (pemerintah pusat/daerah, KKB/OPM, kepala suku/tokoh agamadan masyarakat sipil) dan aktor eksternal (Freeport) dengan tuntutan utama adalah Papua merdeka. Proses negosiasi berlangsung lama dan menghadapi banyak kendala, namun hal ini akan terus diusahakan untuk mendapatkan keputusan yang bersifat win-win solution. Dialog antara Jakarta-Papua harus lebih mencerminkan nilai-nilai budaya orang Papua (Delvia Ananda Kaisupy, 2021).

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam mencari resolusi konflik Papua melalui jalur-jalur negosiasi dengan melibatkan aktor-aktor yang berkonflik dan para *stakeholder* setempat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada proses negosiasi yang dilakukan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan teori negosiasi. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teori tindakan komunikasi aktif Jürgen Habermas dalam penyelesaian konflik Papua.

Studi dengan judul “Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua” pernah dilakukan. Otonomi Khusus Papua dimaksudkan untuk merespon gerakan kemerdekaan dan nasionalisme Papua yang pada hakikatnya memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi menjawab seruan kemerdekaan, memberi perhatian lebih besar pada perkembangan masyarakat asli Papua, pengakuan identitas budaya Papua, memberi ruang besar untuk melakukan kewenangan lokal, namun di sisi lain bisa menjadi semacam pelembagaan masyarakat adat. Penguatan lebih lanjut nasionalisme Papua, dalam arti terus memperkuat semangat nasionalisme dan identitas etnis Papua, yang mungkin kontraproduktif untuk tujuan memperkuat sentimen nasionalisme dan jati diri Indonesia (Muttaqin, 2014).

Penelitian terdahulu memiliki persamaan untuk merespon gerakan kemerdekaan dan nasionalisme Papua yang dilakukan oleh kelompok

separatism. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan otonomi khusus, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan tindakan komunikasi aktif dalam resolusi konflik yang terjadi di Papua.

Beberapa *literature review* diatas menjelaskan bahwa penyelesaian konflik yang ada di papua telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Penyelesaian konflik melalui pendekatan militer juga perlu dikaji ulang terkait dengan efektifitasnya dalam penyelesaian konflik di Papua. Berdasarkan beberapa *literature review* diatas, penulis mencoba menguatkan argumen para peneliti sebelumnya bahwa pendekatan militer dalam penyelesaian konflik di papua perlu dikaji ulang. Tulisan ini akan fokus pada kajian terkait dengan alternatif pendekatan yang memungkinkan untuk dilakukan dalam resolusi konflik separatisme Papua. Kajiannya akan ditekankan pada pendekatan teori kritis Jurgen Habermas dalam perspektif *the theory of communicative action* untuk mencari alternatif pendekatan melalui komunikasi dalam resolusi konflik Papua. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini selain fokus pada relevansi perspektif Jurgen Habermas juga akan memberikan analisis kritis resolusi konflik yang selama ini telah dilakukan Pemerintah, sehingga memungkinkan untuk memberikan wacana baru terkait alternatif resolusi konflik yang memungkinkan dilakukan melalui tindakan komunikasi aktif yang ditawarkan dalam perspektif kritis Jurgen Habermas.

B. Teori Kritis Jurgen Habermas

Teori kritis Jurgen Habermas merupakan bagian dari pemikiran kritis Mahzab Frankfurt (*Die Frankfurter Schule*). Teori kritis ini muncul dari *Institute fur Sozialforschung* (Institute untuk Penelitian Sosial) yang didirikan pada tahun 1923 di Frankfurt am Main. Habermas adalah generasi kedua teori kritis. Teori kritis lahir untuk membongkar selubung ideologis dan irasionalisme fasisme komunis yang telah melenyapkan kejernihan dan kebebasan berfikir. Rezim-rezim fasis yang melakukan penindasan total terhadap manusia disebut oleh

Adorno sebagai “dominasi total” (*Herrschaft*). Teori kritis sebagai teori emansipatoris kemudian menelanjangi *Herrschaft* sehingga teori ini disebut sebagai kritik-ideologi. Kritik ideologi ini bertujuan untuk mewujudkan manusia yang sadar akan penindasan sosial serta melakukan gerakan pembebasan dan pencerahan (Raymond, 1989).

Gagasan mahzab Frankfurt dan Teori Kritis banyak memberikan pengaruh pada gerakan mahasiswa yang kemudian dikenal sebagai “Gerakan Kiri Baru” (*New Left Movement*) pada tahun 1960-1970-an. *New Left Movement* banyak mengadopsi teori-teori Mao Tse-tung, Che Guevara, dan Fidel Castro. Pengikut gerakan ini dalam perjalanannya banyak melakukan kekerasan bersenjata. Hal ini menyebabkan gerakan ini terpecah-pecah dan menjadi kepingan gerakan yang tidak relevan dengan tujuan awalnya. Para tokohnya banyak yang berpisah seperti Adorno, Horkheimer, dan Marcuse. Mahzab Frankfurt mulai banyak ditinggalkan para mahasiswanya karena menolak konsekuensi praksis yang dituntutnya sendiri (Raymond, 1989).

Generasi pertama teori kritis pada akhirnya mengalami jalan buntu karena tidak ada jalan keluar bagi konsep rasionalitas dan konsep praksis yang dikembangkan sendiri. Habermas kemudian hadir untuk memecahkan kebuntuan dan membuka jalan baru bagi teori kritis. Habermas hadir sebagai pelopor baru teori kritis lewat paradigma komunikasinya. Paradigma komunikasi Habermas mencoba membangun basis epistemologis yang sistematis dengan kepentingan kognitif-nya serta berusaha mengkritik saintisme dan positivisme dengan menunjukkan relasi antar teori dan praktis. Teori kritis pada akhirnya harus mengarah pada pembebasan dan pencerahan. Pembebasan dan pencerahan ini merupakan bentuk kesadaran terhadap paksaan yang terselubung untuk membebaskan dari penindasan (Raymond, 1989).

Habermas menginginkan tentang sebuah tatanan sosial yang didasarkan atas ruang publik yang bebas dari segala bentuk dominasi (McCarthy, 1982). Habermas kemudian memberikan penekanan pada bagaimana menjelaskan

komunikasi secara teoritis dan normatif, sehingga dapat melampaui hermeneutika murni tetapi tetap tidak tereduksi menjadi ilmu empiris analitis. Teori kompetensi komunikatif merupakan suatu pendekatan baru yang digunakan dalam sebuah persoalan dengan cara mengartikulasikan dan membumikan konsepsi rasional yang diperluas (McCarthy, 1982, p. 356)

Pemikiran kritis Jurgen Habermas memiliki ciri khas bahwa ia selalu berkaitan erat dengan kritik terhadap hubungan-hubungan sosial yang nyata. Pemikiran kritis merefleksikan masyarakat serta dirinya sendiri dalam konteks dialektika struktur-struktur penindasan dan emansipasi. Filsafat ini tidak mengisolasi diri dalam menara gading teori murni, tetapi bertanggung jawab terhadap keadaan sosial yang nyata (Magnis-Suseno, 1987, p. 176).

Inti dari pemikiran Habermas adalah paradigma komunikasi yang menempati pusat pemikiran dalam usahanya melakukan perubahan sosial. Gagasan utama dalam teori tindakan komunikatif Habermas adalah bahwa komunikasi membuka jalan untuk saling memahami antar aktor sehingga sampai pada konsensus atau kesepakatan bersama. Paradigma komunikasi dengan sendirinya berarti mengedepankan adanya hubungan intersubjektif. Pemikiran Habermas menawarkan pembangunan masyarakat melalui konsep “komunikasi tanpa distorsi”. Habermas juga memberikan penekanan pada rasionalitas komunikatif yang bersifat dialogis untuk mencapai penerangan tanpa paksaan ataupun dominasi.

Teori kritis Habermas menjadi relevan untuk melihat bagaimana pemikiran kritis Habermas dalam kaitannya dengan resolusi konflik separatisme di Papua jika dilihat dari paparan diatas. Latar belakang teori tindakan komunikasi Habermas yang lahir sebagai pemecah kebuntuan atas kekerasan bersenjata yang pernah dilakukan oleh generasi pertama teori kritis relevan untuk melihat resolusi konflik separatisme yang terjadi di Papua. Tindakan komunikasi diharapkan mampu menjadi pemecah kebuntuan dan jalan tengah resolusi konflik separatisme bersenjata di Papua menuju suatu konsensus Papua damai.

1. Sketsa Biografis Jurgen Habermas

Jurgen Habermas merupakan tokoh berkewarganegaraan Jerman. Jurgen Habermas lahir di Dusseldorf, Jerman, pada 1929. Habermas mendapatkan gelar doktornya dari Universitas Marburg pada 1961 dan mendedikasikan dirinya untuk mengajar di Universitas Heidelberg dan Frankfurt. Pada 1971 hingga 1983 ia menjadi direktur Max Planck Institute. Habermas tumbuh dewasa pada periode Jerman telah melewati masa perang dan sedang melakukan rekonstruksi demokrasi (Abrori, 2016, p. 74).

Jurgen Habermas adalah salah seorang tokoh dari Filsafat Kritis. Ciri khas dari filsafat kritisnya ialah bahwa ia selalu berkaitan erat dengan kritik terhadap hubungan-hubungan sosial yang nyata. Pemikiran kritis merefleksikan masyarakat serta dirinya sendiri dalam konteks dialektika struktur-struktur penindasan dan emansipasi. Teori Kritis dirumuskan sebagai sebuah filsafat empiris sejarah dengan maksud praktis dalam pemikiran Habermas (Adat Sudrajat, 2014).

Aliran pemikiran kritis ini awal mulanya dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang semula bekerja di *Institut fur Sozialforschung* pada Universitas Frankfurt. Mereka adalah Marx Horkheimer, Theodor W. Adorno dan Herbert Marcuse serta anggota-anggota lainnya. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan “Mazhab Frankfurt” (Adat Sudrajat, 2014).

Jurgen Habermas adalah anggota generasi kedua mazhab Frankfurt. Frankfurt Schule dipelopori oleh Walter Benjamin, Friederich Pollock, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Erich Fromm, Nathan Ackerman, Franz L. Neumann, Herbert Marcuse dan Henryk Grossmann. Para tokoh pelopor ini disebut dengan aliran Mazhab Frankfurt generasi pertama. Para tokoh ini merupakan generasi awal pencetus Teori Kritis. Tokoh-tokoh Teori Kritis generasi pertama antara lain seperti Lowenthal, Neumann, Adorno,

Hokheimer atau Marcuse. Para tokoh teori kritis ini pada tahun 1934 pindah ke Amerika Serikat lantaran waktu itu Jerman dikuasai Nazi. Seusai perang Dunia II berakhir dan Hitler tidak lagi berkuasa, di antara tokoh-tokoh Teori Kritis generasi pertama ini kembali ke Jerman seperti Adorno, Hokheimer dan Pollock. Beberapa tokoh lain ada pula yang tetap bertahan menetap di Amerika Serikat seperti Erich Fromm yang kemudian hari akhirnya menjadi pemikir dan guru besar yang amat terkenal dan berpengaruh di negeri Paman Sam tersebut. Pada tahun 1960-an dan 1970-an para tokoh Teori Kritis generasi pertama ini memberi pengaruh atas tersebarnya gagasan mereka di kalangan ilmuwan dengan beragam latar belakang disiplin ilmu di sejumlah negara (Olifia & Gora, 2017, p. 68).

Olifia & Gora (2017, p. 72) teori kritis dalam memahami realita sosial tidak ingin terjebak pada proses pereduksian fakta sosial layaknya yang sering dilakukan aliran positivisme. Teori kritis berbeda dengan teori-teori tradisional dalam beberapa hal, diantaranya ialah:

1. Teori kritis menolak memberhalakan pengetahuan sebagai sesuatu yang terpisah dan lebih penting daripada tindakan.
2. Penelitian ilmiah nir-kepentingan tidak mungkin dilakukan dalam suatu masyarakat dimana anggotanya belum otonom.
3. Teori kritis berkeyakinan bahwa penelitian sosial harus selalu berisi komponen historis, bukan sebagai regiditas peristiwa-peristiwa yang dinilai dalam konteks kekuatan-kekuatan historis objektif namun lebih melihat mereka dari sudut pandang kemungkinan historis, sehingga penelitian sosial selalu bersifat dialektis.
4. Teori kritis memahami fenomena sebagai universal sekaligus particular lebih dari sekedar berlogika sebab akibat.
5. Teori kritis memiliki tujuan perubahan sosial, namun menghindari terjebak dalam pragmatisme.
6. Teori kritis berniat menyatukan dirinya dengan semua kekuatan progresif yang berkeinginan untuk menyatakan kebenaran.

7. Teori kritis berbeda dengan Marxisme Ortodoks yang menempatkan superstruktur budaya masyarakat modern dalam posisi sekunder. Teori kritis berkonsentrasi pada dua masalah, yaitu menggabungkan perspektif-perspektif yang bersumber dari ekonomi, politik, sosiologi, teori kebudayaan, filsafat, antropologi dan sejarah.

Titik tolak pemikiran Habermas berangkat pada paham Adorno. Pada tahun 1956, Jürgen Habermas menjadi peneliti di Institut Penelitian Sosial di Frankfurt dan asisten pengajar untuk Adorno. Adorno pada saat itu adalah Profesor Filsafat dan Sosiologi di Universitas Johann Wolfgang Goethe dan juga di Frankfurt. Ketertarikan Adorno pada Habermas dipicu oleh beberapa artikel yang diterbitkan Habermas muda di surat kabar dan majalah *Frankfurt Allgemeine Zeitung (FA Z)*, *the Handelsblatt*, *the Frankfurter Hefte* dan *the Merkur* (Corchia, 2015, p. 2).

Kedekatan intelektual antara Adorno dan Habermas terkonfirmasi melalui esai pertamanya yang diterbitkan dalam *Merkur* edisi Agustus 1954. Pada esai ini Habermas menyesuaikan kritik konservatif yang dipelajari dari teks akademis oleh Hans Freyer, Arnold Gehlen, dan Helmut Schelsky dengan kritik Hegelian-Marxis yang dia baca dalam interpretasi Karl Lowith tentang budaya Eropa, reifikasi György Lukács tentang teori dalam *Sejarah dan Kesadaran Kelas dan Dialektika Pencerahan* oleh Horkheimer dan Adorno. Kompatibilitas teoretis dan cita-cita demokratis membawa Habermas mendekati pemikiran Adorno dan mengantarnya ke konsepsi kritis rasionalisasi modern, meskipun ini hanya untuk sementara berdasarkan teori masyarakat (Corchia, 2015, p. 3).

Habermas mulai mengerjakan proyek penelitian Universitas dan Masyarakat mulai tahun 1952 dibawah bimbingan Adorno. Habermas menerapkan dua prinsip teori kritis, yaitu mengusulkan analisis konteks hubungan antara perkembangan akademis dan ilmiah serta menyelidiki ketegangan dialektika antara representasi diri normatif dari institusi sosiokultural universitas dan

realitas faktual. Proyek ini dalam tradisi Institut Frankfurt berupaya memperbarui hubungan yang bermanfaat antara ilmu sosial dengan praktik konkret, tidak hanya pada instrumental-teknis tetapi juga pada tingkat praktis-moral. Pengaruh Adorno dirasakan dalam menyikapi konsep 'refleksi diri' yang menurutnya setiap spesialisasi akademis harus mencakup refleksi atas kondisi epistemologis pengetahuan dan pada kondisi sosio-historis dari generasi, organisasi, dan pemanfaatan disiplin itu sendiri (Corchia, 2015, p. 7).

Garis perkembangan intelektual global Habermas mengarah dari Marx melalui neo-Marxisme ke Post-Marxisme. Habermas kemudian bergerak menjauh darinya menuju konvergensi dan integrasi teori aksi sosial, teori sistem dan teori interaksionisme simbolik. Adapun Marxisme merupakan salah satu sumber penting dari pandangan teoretisnya. Habermas mendekatinya berdasarkan teori kritis Horkheimer dan Adorno, tetapi dia juga melampaui konsepsi ini (Mitrović, 1999, p. 218).

Habermas memiliki banyak karya yang membahas topik-topik yang menyenangkan baginya. Topik tersebut seperti teori politik, komunikasi politik, teori tindakan komunikatif, universalisasi norma hukum, penanggulangan konsep bangsa, persamaan hak asasi manusia bagi semua orang, partisipasi semua orang dalam pembangunan Perennial atau "kosmopolitan" Perdamaian melalui tindakan komunikatif interpersonal (Indellicato, 2020, p. 75)

Habermas termasuk seorang filsuf yang paling berpengaruh di abad kontemporer. Pergulatan pemikirannya terbentuk setelah ia memasuki sebuah aliran filsafat yang sejak 60 tahun semakin berpengaruh dalam dunia filsafat maupun ilmu-ilmu sosial, yaitu filsafat kritis (Ulumudin, 2006, p. 75).

Habermas telah telah menerbitkan banyak karya agreat, yaitu, *Structure and Public* (1962), *Theory and Practice* (1966), *Knowledge and Interest*, (1968), *Reconstruction of the Historical Materialism*, (1976), *Theory of Communicative Action* (1981), *Problems of Legitimacy in Late Capitalism* (1982), *New Obscurity* (1985) dan *Philosophical Discourse of the Modern* (1985). Namun, ada penekanan pada karya utamanya yang berjudul *Theory of Communicative Action*(Mitrović, 1999, p. 218).

Habermas adalah seorang filsuf kontemporer dengan reputasi dunia. Salah satu idenya yang paling terkenal adalah tindakan komunikatif, di mana para aktor dalam masyarakat berusaha untuk mencapai pemahaman bersama dan untuk mengkoordinasikan tindakan dengan argumen yang beralasan, konsensus, dan kerja sama daripada tindakan strategis hanya untuk mengejar tujuan mereka sendiri(Bolton, 2005, p. 1).

Teori tindakan komunikatif termasuk dalam kumpulan teori post-Marxist modern. Habermas dalam studinya yang berjudul "*Theory of Communicative Action*" (1981) mengesampingkan paradigma Marx. Dia menciptakan teori baru yang mengenai formatnya Habermas membandingkannya dengan teori Parsons di kata pengantar. Dia pertama kali memberikan definisi kategori umum pengetahuan dan tindakan manusia dan kemudian melanjutkan dengan menyimpulkan kategori sosial. Begitu pula pada bagian pendahuluan, Habermas memberikan penghormatan kepada sosiologi sebagai satu-satunya ilmu sosial yang berhasil melestarikan tingkat tinggi berkat konsep "rasionalitas" sebagai pusat penelitiannya (Mitrović, 1999, p. 219).

Teori tindakan komunikatif Habermas merupakan sintesis kritis dari teori sosiologis terkemuka, terutama dari Parsons, Weber dan Marx. Tujuan umum teoretisnya adalah untuk menghubungkan teori tindakan komunikatif, sebagai varian dari teori tindakan, dengan teori sistem menjadi pendekatan komprehensif terhadap teori sosial (Mitrović, 1999, p. 219).

2. Konflik dalam Perspektif Kritis Jürgen Habermas

Konflik merupakan serapan dari bahasa Inggris *conflict* yang berarti percekocokan, perselisihan, pertentangan. *Longman Dictionary of Contemporary English*, konflik didefinisikan sebagai *A state of disagreement or argument between opposing groups or opposing ideas or principles, war or battle, struggle to be in opposition; disagree*. Konflik pada pemahaman ini didefinisikan sebagai ketidakpahaman atau ketidaksepakatan antara kelompok atau gagasan-gagasan yang berlawanan atau dengan kata lain ketidaksetujuan antara beberapa pihak.

Tesis ini akan melihat konflik yang terjadi dari sudut pandang mazhab kritis. Teori kritis disebut juga aliran Frankfurt (*Frankfurter Schule*) yang berasal dari *Institut für Sozialforschung* di Frankfurt atau Main di Jerman. Pemikiran aliran Frankfurt disebut sebagai “Teori Kritis Masyarakat” (*Keine Kritische Theorie der Gesellschaft*). Teori itu diciptakan sebagai bentuk pembebasan manusia dari pemanipulasian para teknokrat modern (Dermawan, 2013, p. 329).

Mazhab ini berusaha menganalisis bagaimana kajian emansipatoris untuk dapat membebaskan masyarakat dari kekejaman struktur sosial yang menindas masyarakat oleh sekelompok penguasa. Konflik pada tesis ini akan dilihat dari perspektif Jürgen Habermas.

Definisi konflik menurut Habermas konflik merupakan sesuatu yang inheren dalam sistem masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dan sifat kekuasaan yang mendominasi. Konflik dalam pandangan mazhab kritis Habermas menganalisis kondisi dari dominasi struktural. Mazhab kritis melihat kelompok penguasa mengarahkan berbagai bentuk kebijakan pada orang lain melalui wewenang dan kekuasaannya. Kondisi ini merupakan bentuk dominasi. Habermas melihat kondisi ini

sebagai komunikasi yang dihasilkan dari kondisi ini selalu memuat kepentingan penguasa untuk menundukkan. Hal inilah yang disebut Habermas sebagai komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental hanya memberi peluang pada pemilik kekuasaan, dan tidak akan menciptakan kesepahaman (Zuldin, 2019, p. 172).

Habermas menjelaskan lebih lanjut bahwa kesadaran instrumental ini berakar pada rasionalisme. Habermas dalam *The Theory of Communicative Action* memperlihatkan bagaimana kesadaran instrumental menciptakan model komunikasi yang sifatnya mengusai. Birokrasi modern adalah struktur negara yang menggunakan kesadaran dan komunikasi instrumental. Kondisi inilah yang menyebabkan ketertindasan masyarakat dalam bentuk ketidakmampuan mengeluarkan pendapat mengenai keinginan dan harapan mereka. Negara dan birokrasinya menutup ruang berpendapat masyarakat (*public sphere*) melalui kontrol keamanan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Terkuncinya ruang publik bisa mengakibatkan kekesalan, frustrasi, dan bentuk kekerasan dalam perlawanan politik (Zuldin, 2019, p. 173).

Habermas lebih lanjut mengajukan komunikasi instrumental diubah menjadi komunikasi intersubjektif. Komunikasi intersubjektif ini membuka ruang-ruang dialog yang bebas dari dominasi penguasa. Para penguasa yang melegitimasi wewenang dan kebijakan harus bersedia menggunakan komunikasi yang setara dan terbuka sehingga dapat menghindari konflik antara pengambil keputusan dan masyarakat biasa. Pemerintah dalam memutuskan kebijakan kerap kali tidak melibatkan semua pihak. Keputusan yang diambil terkadang diabaikan bahkan terjadi penolakan baik melalui kekerasan maupun proses hukum (Zuldin, 2019, p. 173).

Teori Habermas ini relevan untuk menganalisis pertentangan antara OPM dengan Pemerintah. Dominasi struktural penguasa melalui wewenang dan kekuasaannya dalam membuat kebijakan-kebijakan di Papua dapat dilihat sebagai suatu komunikasi yang menundukkan. Hal ini yang disebut sebagai

komunikasi instrumental sebagai bentuk dominasi. Kondisi dari dominasi struktural inilah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pemberontakan oleh OPM.

3. **Management Konflik dalam Kerangka Teori Kritis Jurgen Habermas**

Manajemen konflik dijelaskan Minnery (1985, p. 220) sebagai suatu proses rasional yang sifatnya *iteratif*, dimana proses tersebut terjadi secara terus-menerus mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang representatif dan ideal. Penanganan konflik menurut Wahyudi (2015, p. 2) secara bijaksana, adil dan efisien dapat dilakukan melalui tiga metode pengelolaan konflik, yaitu stimulasi konflik, pengurangan/penekanan konflik dan penyelesaian konflik. Pengelolaan konflik juga membutuhkan keterampilan komunikasi yang efektif.

Zambrano Mora (2014, p. 28) manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi.

Habermas membayangkan sebuah masyarakat komunikatif sebagai masyarakat yang tidak melakukan kritik lewat revolusi dan kekerasan, akan tetapi dengan memberikan argumentasi hingga pada akhirnya tercapa sebuah konsensus. Habermas meyakini bahwa tindakan komunikasi aktif sangat diperlukan untuk membangun konsensus bersama dalam sebuah masyarakat.

Harnowo (2020, p. 58) menjelaskan bahwa teori tindakan komunikatif Habermas bertumpu pada gagasan bahwa tatanan sosial pada akhirnya tergantung pada kapasitas para aktor untuk mengenali validitas atau kesahihan intersubjektif dari berbagai klaim yang menjadi dasar kerja sama sosial. Kerja sama melalui tindakan komunikatif diperoleh dengan klaim

kesahihan yang dapat dijustifikasi melalui komunikasi termasuk dengan cara mengkritisi. Teori tindakan komunikatif bergantung pada justifikasi, yaitu teori argumentasi atau diskursus. Oleh karenanya, diskursus oleh Habermas disebut sebagai “bentuk reflektif” dari tindakan komunikatif.

Tindakan komunikatif yang dijustifikasi melalui klaim kesahihan dapat membangun suatu pemahaman bersama dan kerjasama sosial. Mediasi melalui jalur perundingan dengan menggunakan tindakan komunikasi aktif menjadi jalan untuk mencapai konsensus bersama dalam kasus Papua dapat menjadi sebuah keniscayaan. Konsensus dari hasil komunikasi dapat menjadi jalan penyelesaian konflik yang terjadi di Papua.

Penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan teori kritis Habermas sebagai alternatif penyelesaian konflik yang dapat diterapkan sebagai kerangka kerja melalui proses mediasi. Pertimbangan penggunaan teori diskursus Habermas adalah untuk mengidentifikasi persamaan konsepsi antara teori diskursus Habermas dan komunikasi sebagai alternatif penyelesaian konflik.

a. Tindakan Komunikasi Aktif Jurgen Habermas

Menurut Habermas komunikasi adalah sifat dasar manusia. Manusia yang berkumpul akan berinteraksi satu sama lain. Alat untuk berinteraksi itu adalah bahasa. Orang-orang melalui komunikasi akan *sharing* ide, pengetahuan, informasi dan juga melalui komunikasi orang akan membahas solusi untuk masalah-masalahnya. Rumusan ini dikenal dengan teori tindakan komunikatif Habermas yang ia tulis dalam bukunya “Teori Tindakan Komunikatif” (Abrori, 2016, p. 75).

Habermas menawarkan pemikiran dan gagasan yang mendukung tindakan komunikasi sebagai penyelesaian permasalahan sosial. Gagasan ini yang mendukung kebebasan dalam berkomunikasi, berkembangnya

argument dan gagasan. Penyelesaian permasalahan selanjutnya dilakukan dengan argument bukan didasarkan atas pergerakan frontal. Hal ini sebagai langkah awal dalam membangun paradigma komunikasi sebagai hasil dari tindakan komunikasi nyata dalam ruang publik.

(Habermas, 1981) menekankan bahwa *The Theory of Communicative Action* memiliki tujuan yang terikat satu sama lain, yaitu :

1. Mengembangkan konsep rasionalitas yang tidak terikat dan dibatasi oleh premis-premis subjektif filsafat modern dan teori sosial. Habermas mengembangkan kerangka kerja kategoris dan sejumlah landasan normatif teori sosial dalam bentuk teori umum tindakan komunikatif. Habermas membangun konsep melalui asumsi bahwa aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan secara sosial dan terbangun melalui komunikasi dalam wilayah kehidupan tertentu melalui komunikasi yang ditujukan untuk pencapaian pemahaman, maka hal ini mengharuskan terpenuhinya sejumlah syarat rasionalitas yang melekat pada tindakan komunikatif.

Pemikiran-pemikiran modern melihat subjek berdiri berhadapan dengan dunia objek melalui hubungan representasi dan tindakan. Tipe rasionalitas yang diasumsikan pada model ini adalah rasionalitas “kognitif-instrumental”. Rasionalitas ini menekankan pada pengetahuan subjek tentang lingkungan yang dimanfaatkan secara efektif dengan beradaptasi dan merekayasa lingkungan berdasarkan kecerdasannya. Melalui penekanan fakta bahwa berorientasi-tujuan dari berbagai individu dikoordinasikan secara sosial, Habermas menggeser perhatian ke tindakan-bertujuan individu yang lebih luas, yaitu struktur interaksi sosial. Habermas menekankan pada dimensi komunikatif dalam tindakan sosial sebagai kunci terpenting dalam peletakan dasar teori sosial.

2. Mengkonstruksikan masyarakat dua-level yang mengintegrasikan dunia kehidupan dan paradigma sistem. Tindakan komunikatif merupakan media pencapaian pemahaman dalam tawar-menawar tentang suatu situasi yang harus disepakati bersama. Habermas berargumen bahwa konsep tindakan komunikatif dan konsep dunia kehidupan yang dikembangkan sebagai pelengkap dapat berfungsi sebagai kategori dasar teori sosial umum yang dapat digubakan untuk membangun kerangka kerja yang didalamnya muncul variasi dunia kehidupan yang konkret.

Habermas lebih lanjut menjelaskan rasionalisasi membuka kemungkinan aplikasi metodologi ilmu-ilmu empiris dalam tingkah laku rasional untuk mewujudkan sasaran-sasaran. Rasionalisasi mencakup pilihan-pilihan atas teknik-teknik untuk penerapan. Pertimbangan-pertimbangan teknis diterjemahkan ke dalam praksis, yaitu teknologi dan industri sistem sosial. Habermas menjelaskan bahwa masyarakat pada hakekatnya komunikatif dan yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata perkembangan kekuatan-kekuatan produksi atau teknologi, melainkan, proses belajar dalam dimensi praktis-etis.

3. Mengsejajarkan teori kritis tentang modernitas dengan menganalisis dan membahas patologi-patologi melalui cara yang lebih menyoroti perubahan arah. Konsep yang ditekankan oleh Habermas dalam *The Theory of Communicative Action* tersebut dimaksudkan oleh Habermas bahwa teori tindakan komunikasi aktif bertujuan untuk membuka kemungkinan bagi konseptualisasi konteks dunia kehidupan yang disesuaikan dengan paradoks-paradoks modernitas.

Jürgen Habermas mendasari teori tindakan komunikasi atas dasar rasionalitas. Habermas menggunakan istilah rasional dengan mengandaikan adanya suatu hubungan yang erat antara rasionalitas dan

pengetahuan. Hal ini akhirnya membuat Habermas dikenal sebagai tokoh rasionalisasi besar terkahir yang memiliki kekhasan dengan gaya dialektis yang berusaha memasukkan *insight-insight* sentral kritik atas rasionalisme (Habermas, 1981). Weber menegaskan rasionalisasi masyarakat sebagai reifikasi kesadaran (Habermas, 1981, p. 1). Sejalan dengan pemikiran Adorno mengenai gagasan-gagasan rekonsiliasi dan kebebasan diurai dengan konsep rasionalitas komunikatif. Teori tindakan digunakan untuk memproyeksikan suatu komunitas-komunitas ideal seperti teori tindakan yang dikembangkan oleh Mead. Tindakan komunikatif tidak hanya berfungsi sebagai pencapaian pemahaman, tetapi juga diarahkan pada pencapaian tujuan dan media untuk melakukan sosialisasi (Habermas, 1981, p. 6).

Rasionalisasi pada praktik komunikatif mengacu pada praktik argumentasi saat terjadi ketidaksepakatan yang tidak dapat diatasi dengan penggunaan kekuatan secara langsung dan strategis. Habermas (Habermas, 1981, p. 22) menegaskan praktik dalam tindakan-tindakan rasionalisasi sebagai berikut:

(t)Tindakan-tindakan yang diatur oleh norma, penampilan diri secara ekspresif, dan juga ekspresi-ekspresi evaluatif, melengkapi tindak wicara konstantif dalam membentuk praktik komunikatif dalam membentuk praktik komunikatif yang, dengan latar belakang dunia-kehidupan, diarahkan untuk mencapai, mempertahankan, dan memperbarui konsensus-konsensus yang didasarkan pada pengakuan intersubjektif atas klaim validitas yang dapat dikritik. Rasionalitas yang melekat pada praktik ini dilihat dilihat di dalam fakta bahwa suatu kesepakatan yang dicapai secara komunikatif pada akhirnya harus didasarkan pada rasio.

Habermas mengembangkan kerangka kerja kategoris dan sejumlah landasan normatif teori sosialnya dalam bentuk teori umum tindakan komunikatif. Aktifitas manusia dikoordinasikan secara sosial melalui tindakan komunikasi yang ditujukan kepada pencapaian pemahaman dengan mengharuskan terpenuhinya sejumlah syarat rasionalitas yang melekat pada tindakan komunikatif. Gagasan tentang rasionalitas

dikembangkan oleh Habermas melalui pencapaian pemahaman timbal-balik dalam komunikasi yang bebas dari paksaan (Habermas, 1981).

Konsep Habermas tentang pencapaian pemahaman (*Verständigung*) adalah kesempatan menggunakan alasan untuk memperoleh kemampuan intersubjektif atas klaim-klaim validitas yang dapat dikritik (Habermas, 1981). Habermas memiliki pandangan tentang identitas ego yang terpusat pada kemampuan untuk merealisasikan diri menurut syarat *intersubjektif* yang dimiliki bersama secara komunikatif (Habermas, 1981).

Habermas menelaah empat konsep tindakan sosial yang paling menentukan, yaitu: tindakan teologis, tindakan yang diatur secara normatif, tindakan dramaturgis dan tindakan komunikatif. Habermas berpendapat bahwa tindakan komunikatiflah yang sepenuhnya melibatkan bahasa sebagai media pencapaian pemahaman dalam tawar-menawar tentang suatu situasi yang mesti disepakati bersama dikritik (Habermas, 1981).

Habermas meyakini bahwa interaksi dalam sebuah komunikasi aktif sangat diperlukan untuk membangun sebuah konsensus bersama dalam sebuah masyarakat. Tindakan komunikasi dalam kasus Papua merupakan jalan untuk mencapai konsensus untuk menuju sebuah perdamaian adalah keniscayaan. Konsensus yang dibuahkan dari hasil dari komunikasi dapat menjadi jalan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Papua.

Habermas dalam bukunya, *The Theory of Communicative Action*, menjelaskan gagasannya tentang perlunya interaksi untuk membangun konsensus bersama dalam sebuah masyarakat. Setiap orang harus menyampaikan gagasannya sehingga orang lain tahu. Gagasan utama dalam teori tindakan komunikatif Habermas adalah bahwa komunikasi membuka jalan bagi antar aktor untuk saling memahami sehingga sampai pada konsensus atau kesepakatan bersama. Jalan untuk mencapai

konsensus itu adalah dengan cara para aktor mau berdialog. Antar aktor akan mengajukan gagasan yang menurutnya benar. Habermas mengistilahkan dengan *validity claims* (klaim kebenaran) dengan argumentasi dan bukti-bukti. Hal ini dilakukan untuk mencapai suatu konsensus dari hasil dialog seseorang harus terbuka akan kritik. Masing-masing aktor akan lebih mudah untuk mencapai suatu titik temu akan klaim-klaim kebenaran subjektif. Hal ini yang akan melahirkan kebenaran inter-subjektif, yakni konsensus atau kesepakatan bersama (Abrori, 2016, p. 78).

Menurut Habermas masyarakat pada hakekatnya komunikatif dan yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata perkembangan kekuatan-kekuatan produksi atau teknologi melainkan proses belajar dalam dimensi praktis-etis. Pengetahuan yang benar tentang realitas harus dicapai melalui dialog. Hal ini perlu dilakukan terlebih pada masyarakat modern begitu plural dan terdiferensiasi, orang tidak bisa mengklaim kebenaran berdasarkan subjektifnya sendiri. Komunikasi intersubjektif diperlukan agar kebenaran obyektif bisa tercapai. Orang bisa bebas bersuara mengajukan logika (*reason*) dan pendapatnya (*argument*). Kebebasan inilah yang menjadi landasan penting bagi Habermas, yakni bagaimana caranya agar tindakan komunikatif itu bisa terwujud. Kebebasan itu membuka emansipasi bagi setiap individu untuk berpartisipasi. Kata kunci pada paragraf ini adalah, kebebasan, emansipasi dan partisipasi. Emansipasi adalah ciri khas dari mazhab Frankfurt yang berasal dari ide seorang Marx. Menurut Marx, emansipasi yang melekat pada sifat dasar manusia adalah kerja. Pandangan Marx tentang hal ini dikritik oleh Habermas. Habermas melakukan revisi terhadap pemikiran Marx bahwa menurut Habermas sifat dasar manusia adalah komunikasi

Rasionalitas instrumental merupakan rasionalitas yang bersifat menghegemoni. Rasionalitas instrumental ini juga bersifat monologis yang bertujuan untuk mengontrol. Rasionalitas komunikatif adalah “rasionalitas” yang bekerja untuk mencapai kesepakatan bersama melalui bahasa atau sarana-sarana komunikasi yang lain. Rasionalitas komunikatif ini lebih bersifat dialogis ketimbang monologis, lebih ditujukan untuk mencapai penerangan daripada paksaan atau dominasi.

Habermas pada *Communication and the Evolution of Society*, menguraikan perkembangan masyarakat sebagai sebuah proses rasionalisasi dari komunikasi dunia kehidupan yang bersifat spontan terdiferensiasi ke dalam berbagai subsistem sosial yang bersifat objektif. Proses rasionalisasi ini sebagai transformasi sosial yang terjadi di dalam dunia kehidupan yang terstruktur secara komunikatif. Prinsip-prinsip komunikasi yang terbentuk harus mampu merealisasikan tujuan-tujuannya dalam kaitan dengan masyarakat. Apabila subsistem-subsistem sosial tersebut melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, maka prinsip-prinsip komunikasi yang bersifat objektif harus merefleksikan hubungan-hubungan sosial dalam dunia kehidupan yang bersifat spontan. Standar validasinya adalah rasionalitas komunikatif, yakni apa yang secara publik disepakati atas dapat disepakati secara rasional.

Tindakan komunikatif merupakan bentuk tindakan sosial yang diungkapkan melalui Bahasa. *Another form of social action is communicative action. This takes place through language and it aims to achieve mutual understanding. It focuses on agreement, a common understanding of norms, meaning and values and on maintaining social relationships (Habermas 1979). In communicative action, people reach understanding through having a common background of assumptions about the world. Communicative action is based on a knowledge of*

norms, conventions, habits and accepted world views, all of which can be expressed in ordinary language (Lyytinen & Klein, 1985).

Sejalan dengan apa yang dikatakan Habermas bahwa solusi permasalahan dari konflik yang terjadi di Papua akan lebih mudah untuk dirumuskan melalui tindakan komunikasi. Komunikasi akan memungkinkan terjadinya pengerucutan solusi atas konflik yang terjadi. Solusi yang tidak hanya menguntungkan satu belah pihak saja, tetapi sebuah kesepakatan yang dapat mengakomodir kepentingan bersama sehingga konsensus Papua damai dapat terwujud.

Tabel 1. Type of Action Jurgen Habermas

OrientasiTindakan Situasi Tindakan	Orientasi pada Keberhasilan	Orientasi pada Pencapaian Pemahaman
Non sosial	Tindakan Instrumental	---
Sosial	Tindakan Strategis	Tindakan Komunikatif

Sumber: Habermas (1981, p. 350)

Titik tolak model tindakan Habermas menyatakan bahwa orientasi utama aktor adalah untuk mencapai hasil. Aktor memilih sarana yang dipandang sesuai dengan tujuan tersebut pada situasi tertentu dan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi tindakan yang dapat diperkirakan sebagai syarat agar tujuan tersebut tercapai. Keberhasilan didefinisikan sebagai tampilan luar dunia yang pada situasi tertentu dapat dihasilkan secara kausal melalui tindakan atau dengan menahan diri yang berorientasi pada tujuan. Efek-efek tindakan meliputi hasil tindakan yang diperkirakan dan berpeluang serta efek yang dipertimbangkan aktor. Tindakan yang berorientasi pada keberhasilan inilah yang disebut dengan *tindakan instrumental*.

Tindakan tersebut dilihat berdasarkan aturan-aturan teknis tindakan yang dijabari keampuhannya dalam mengintervensi suatu kompleks situasi dan peristiwa-peristiwa. Kemudian, jika tindakan itu dilihat berdasarkan aspek-aspek pilihan rasional dan dijabari keampuhannya dalam mempengaruhi keputusan-keputusan lawan yang rasional maka tindakan itu disebut dengan *tindakan strategis*.

Tindakan sosial dapat dikaitkan dan disubordinasikan ke bawah tipe interaksi sosial yang berbeda, misalnya sebagai "elemen-elemen tugas" peran sosial, sedangkan tindakan strategis sudah dengan sendirinya menjadi tindakan-tindakan sosial. Kemudian terkait dengan *tindakan komunikatif* adalah manakala tindakan para agen yang terlibat tidak diatur dengan kalkulasi egosentrisme keberhasilan, tetapi dengan aksi-aksi pencapaian pemahaman.

Pada tindakan komunikatif orientasi utama partisipan bukanlah untuk mencapai keberhasilan pribadi. Para partisipan dapat mengejar tujuan-tujuan dengan syarat mereka dapat mengharmonisasikan rencana tindakan mereka berdasarkan definisi-situasi yang sama. Negosiasi definisi-situasi dalam hal ini merupakan suatu elemen mendasar bagi upaya interpretatif yang diperlukan bagi tindakan komunikatif (Habermas, 1981, p. 350).

Habermas menjelaskan terkait *Orientasi pada keberhasilan versus orientasi pada tercapainya pemahaman* ialah saat mengidentifikasi tindakan strategis dan tindakan komunikatif untuk diklasifikasikan secara kongkrit sebagai tipe-tipe tindakan. Istilah "strategis" dan "komunikatif" digunakan Habermas untuk menjabarkan dua aspek analitis, yaitu pengaruh resiprokal satu sama lain oleh pihak lawan yang bertindak secara rasional-bertujuan dan sebagai proses pencapaian pemahaman. Sebaliknya, tindakan sosial dapat dipilah-pilah apakah partisipan menerapkan sikap orientasi pada keberhasilan atau pada

pencapaian pemahaman. Pada kondisi yang sesuai, sikap-sikap ini dapat dikenali lewat pengetahuan intuitif para partisipan itu sendiri (Habermas, 1981, p. 351).

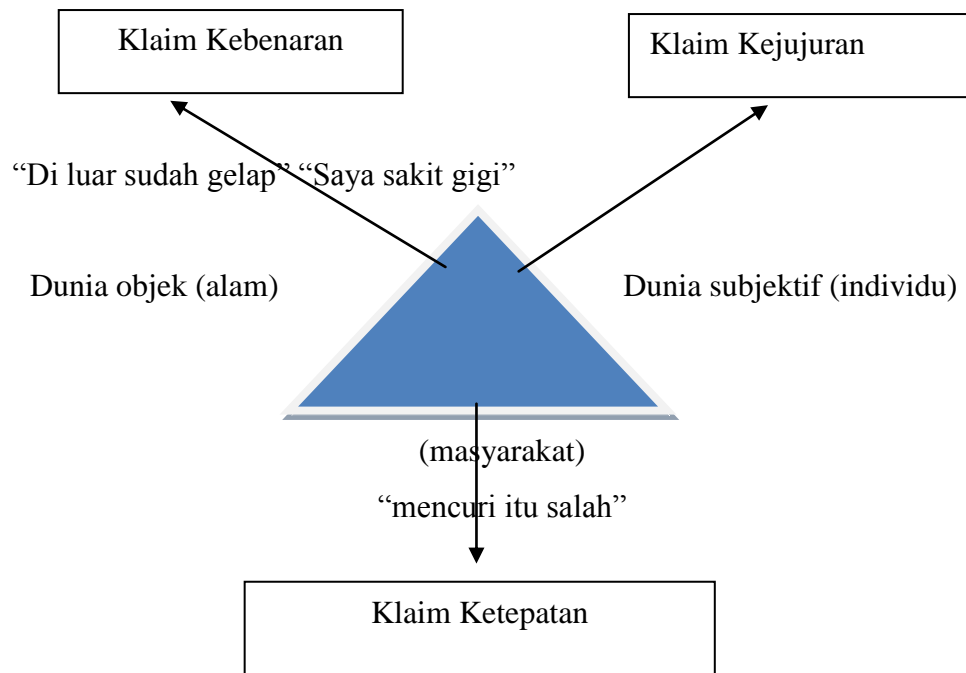
1. *Validity of Clims* Jürgen Habermas

Konsep pada kerangka tindakan komunikasi, para partisan harus melakukan komunikasi yang memuaskan. Para partisan harus berusaha untuk membuat lawan bicaranya mencapai pada suatu pemahaman, yaitu berusaha mencapai apa yang disebutnya “klaim-klaim kesahihan” (*validity of clims*). Pencapaian sebuah pemahaman berfungsi sebagai mekanisme koordinasi tindakan aktor dalam interaksi yang datang pada sebuah persetujuan klaim validitas tentang ucapan mereka, yaitu melalui intersubjektivitas yang mengakui klaim validitas. Klaim validitas inilah yang dipandang rasional dan akan diterima tanpa paksaan sebagai hasil konsensus.

Habermas melalui bukunya *The Theory of Communicative Action* menyebut empat macam klaim, yaitu klaim “kebenaran” (*truth*), klaim “ketepatan” (*rightness*), kejujuran” (*sincerety*), dan “komprehensibilitas” (*comprehensibility*). Jika ada kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif, berarti mencapai “klaim kebenaran” (*truth*). Jika ada kesepakatan tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, berarti mencapai “klaim ketepatan” (*rightness*). Jika ada kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, berarti mencapai “klaim autentisitas atau kejujuran” (*sincerety*). Akhirnya, jika mencapai kesepakatan atas klaim-klaim di atas secara keseluruhan, berarti mencapai “klaim komprehensibilitas” (*comprehensibility*).

Setiap komunikasi yang efektif harus mencapai keempat klaim ini. Habermas menjelaskan bahwa Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik lewat revolusi dengan kekerasan, akan tetapi dengan memberikan argumentasi untuk pada akhirnya tercapai sebuah konsensus.

Gambar 1. Validity of Clims Jurgen Habermas



Sumber: Hadirman (2009:37)

Nuris (2016) menjelaskan bahwa Habermas kemudian merumuskan syarat-syarat komunikatif sebagaimana yang terangkum dalam *the ideal speech situation* (situasi percakapan yang ideal), yaitu:

1. Semua peserta mempunyai peluang yang sama untuk memulai suatu diskusi dan dalam diskusi itu mempunyai peluang yang sama untuk mengemukakan argumen-argumen dan mengkritik argumen-argumen peserta lain.
2. Diantara peserta-peserta tidak ada perbedaan kekuasaan yang dapat menghindari bahwa argumen-argumen yang mungkin relevan sungguh-sungguh diajukan juga; dan akhirnya.

3. Semua peserta mengungkapkan pemikirannya dengan ikhlas, sehingga tidak mungkin terjadi yang satu memanipulasi yang lain tanpa disadarinya

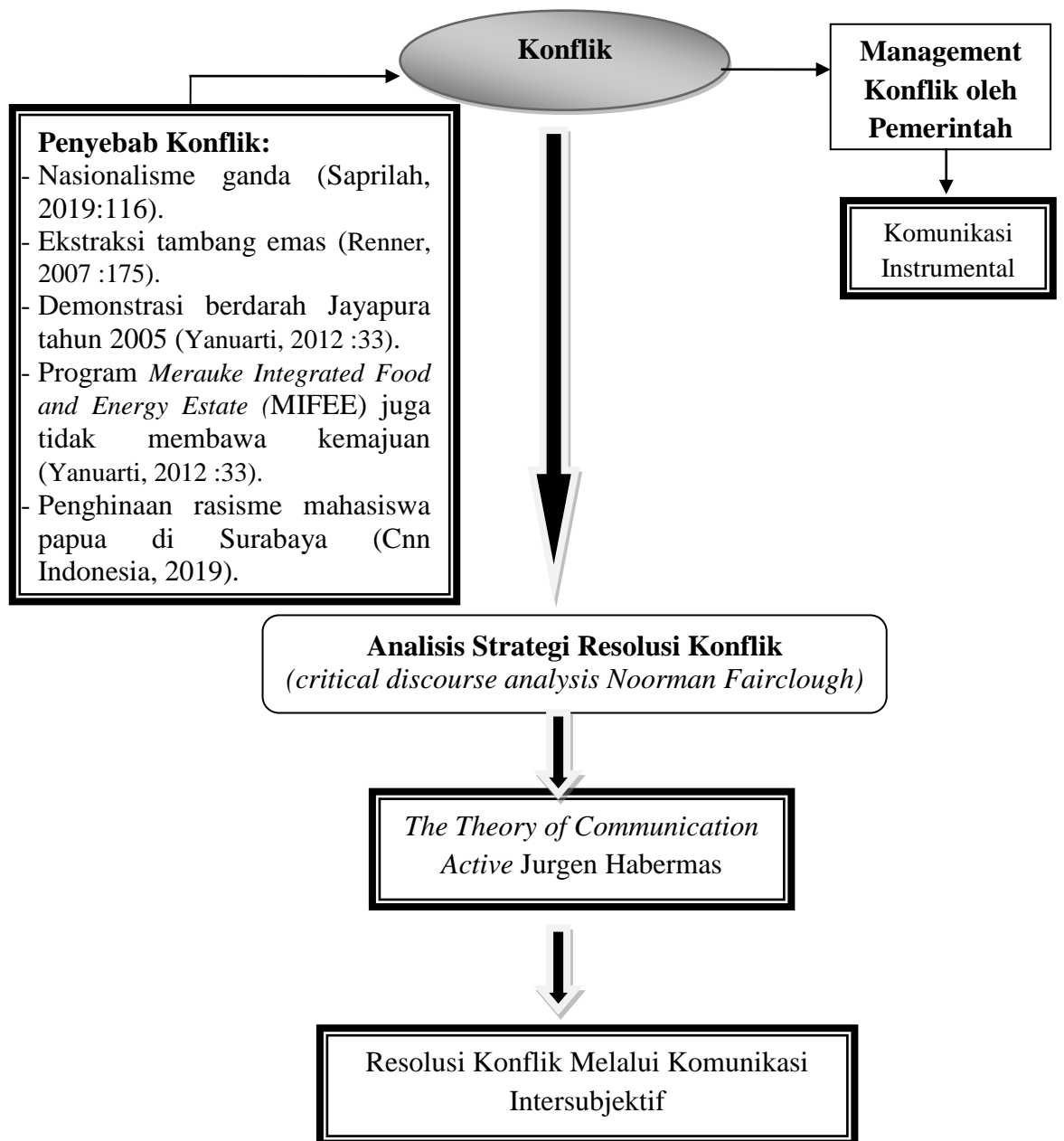
C. Kerangka Berfikir

Konflik separatisme terjadi di tanah Papua. Konflik terjadi antara kelompok separatisme bersenjata yang melakukan pemberontakan kepada Pemerintah Pusat untuk menuntut kemerdekaan Papua. Konflik dipicu oleh berbagai isu, mulai dari perebutan sumber daya alam hingga kasus rasisme terhadap orang asli Papua. Sumber daya alam yang sangat melimpah di Papua tak mampu mengantarkan rakyat Papua menuju kesejahteraan. Rakyat Papua tetap berada pada lingkaran kemiskinan, ketertinggalan, dan keterbelakangan.

Saat konflik berkepanjangan terjadi di Papua, Pemerintah kerap melakukan penyelesaian konflik melalui pendekatan militeristik. Pendekatan militeristik seolah mencerminkan kultur lama yang diwariskan oleh Orde Baru. Pendekatan militeristik menjadi tidak relevan untuk dikedepankan karena hanya akan menimbulkan traumatik bagi rakyat Papua jika ada tindakan represif dari para aparat. Pendekatan ini juga hanya menimbulkan kesan saling serang antara Pemerintah dengan kelompok-kelompok yang berseberangan.

Tulisan ini mencoba menawarkan pendekatan berbeda dalam resolusi konflik di Papua melalui pemikiran kritis Habermas. Analisis kritis akan dilakukan menggunakan *critical discourse analysis*. Pemikiran Habermas dalam *The Theory Of Communicative Action* akan memberikan alternatif dan warna pendekatan yang berbeda dalam resolusi konflik di Papua. Resolusi konflik untuk mencapai sebuah konsensus dapat dilakukan melalui tindakan komunikatif antara aktor-aktor yang sedang berkonflik

Gambar 2. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif. Sugiyono (2015, p. 15) penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan dasar filsafat postmodernisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alami dan peneliti memainkan perannya sebagai kunci utama. Moleong (2010, p. 20) mengemukakan bahwa:

“penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Beberapa definisi diatas dapat mempertegas kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan kajian secara mendalam terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan substansi fokus permasalahan secara mendalam. Model pendekatan kualitatif dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan secara lebih luas karena didasarkan pada persepsi, eksplorasi pemikiran dan pengembangan konsep. Peneliti dapat menggali data-data yang dibutuhkan melalui pengumpulan data baik berupa informasi maupun laporan secara lebih mendalam dan menyeluruh yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik seperti pada penelitian kuantitatif.

Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Sugiyono (2015, p. 3) deskriptif analisis merupakan suatu metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dan menganalisa secara mendalam sehingga akan ditemukan makna secara signifikan yang akan

mempengaruhi substansi penelitian. Data yang dikumpulkan berupa informasi yang memuat keterangan-keterangan. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena pendekatan ini dianggap paling tepat untuk mengembangkan penelitian ini dan mendapatkan pemahaman secara mendalam.

Penelitian ini akan menghasilkan data yang deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjabarkan serta menafsirkan data yang ada. Pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa dan interpretasi yang berkaitan dengan relevansi pemikiran kritis Jurgen Habermas dalam resolusi konflik separatisme di Papua. Kajian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan deskriptif di mana bertujuan untuk memberikan deskripsi aspek-aspek ataupun karakter suatu pesan atau teks (Eriyanto, 2011).

Tipe penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan akan dijabarkan dengan perspektif kritis. Aspek yang esensial dalam pandangan kritis yaitu upaya pemahaman atas kondisi sosial atas konflik yang terjadi di Papua antara kelompok separatisme dan Pemerintah. Secara operasional penelitian ini akan menggambarkan proses analisis kritis terhadap kasus konflik separatisme di Papua dengan menggunakan perspektif kritis Jurgen Habermas Melalui *The Theory of Communicative Action*.

Tipe penelitian ini dianggap sangat relevan untuk digunakan dalam menggambarkan objek penelitian ini. Penelitian kualitatif akan digunakan untuk menggali lebih dalam akar konflik yang terjadi di Papua. Model penelitian kualitatif juga dirasa tepat untuk mendeskripsikan konflik yang terjadi di Papua sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa. Model penelitian kualitatif ini akan memudahkan peneliti untuk menggali data-data terkait konflik separatisme yang terjadi di Papua. Akar konflik yang terjadi harus digali secara mendalam yang akan disajikan dalam bentuk deksriptif dan tidak bisa diwakilkan dalam bentuk angka statistik. Analisis kritis untuk

membuat sebuah interpretasi dari hasil penelitian juga relevan untuk dilakukan dengan model penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan aspek Pemikiran Jurgen Habermas dalam Resolusi Konflik Separatisme di Papua melalui *critical discourse analysis* Norman Fairclough. Tulisan ini akan fokus dalam mengkaji resolusi konflik separatisme di Papua melalui teori kritis Habermas. Peneliti akan fokus untuk mengkaji bagaimana perspektif kritis Jurgen Habermas dalam menawarkan resolusi atas konflik separatisme yang terjadi di Papua. Perspektif kritis Jurgen Habermas yang digunakan adalah *The Theory of Communicative Action* dengan melakukan *critical discourse analysis*.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberitaan di media surat kabar online. Pemberitaan yang diambil sebagai data adalah pemberitaan terkait dengan resolusi konflik separatisme di Papua yang dilakukan antara Pemerintah dan kelompok separatisme sebagai aktor yang berkonflik.

Sumber data pada penelitian ini berupa pidato presiden dan pers release pemerintah dan pers release pemerintah yang digunakan terkait dengan respon pemerintah dalam menanggapi dan membeikan resolusi atas eskasi konflik yang meningkat di Papua.

Pengambilan data dilakukan selama kurang lebih kurun waktu 5 tahun terakhir. Alasan pengambilan data dalam kurun waktu tersebut karena konflik

Papua kembali menyeruak mulai dari terjadinya kasus rasisme, penyerangan terhadap para pekerja proyek Trans-Papua, pecahnya konflik di wilayah Nduga, kasus penembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, dan banyak konflik lainnya yang terjadi kurun waktu belakangan ini. Hal tersebut juga berimplikasi pada banyaknya pemberitaan tentang Papua selama kurun waktu tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, maka pengambilan data selama kurang lebih 5 tahun terakhir oleh peneliti dianggap cukup untuk menemukan pola komunikasi yang dilakukan selama ini dalam menyikapi konflik yang terjadi di Papua.

Berikut rincian data primer yang digunakan pada penelitian ini:

- a. Pidato Presiden Jokowi Tanggapi Penembakan Pekerja Trans-Papua (KOMPASTV, 5 Desember 2018).
- b. Pers Relase Pemerintah melalui Pernyataan Mahfud Soal KKB Organisasi Teroris Hingga Status Papua Adalah NKRI (KOMPASTV, 29 April 2021).

2.Data Sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada dan digunakan untuk melakukan pencarian fakta dan pelengkap informasi. Data sekunder akan dikumpulkan melalui pengumpulan data-data dokumen, buku, jurnal, surat kabar, dokumentasi lembaga terkait, dan sumber-sumber data sekunder lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2015, p. 62) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian bagi penulis untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. Data yang

telah dikumpulkan akan diolah oleh penulis untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan teknik dalam metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Menurut Sugioyono (2015, p. 83) hasil penelitian akan kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode simak dengan teknik lanjutan yaitu teknik baca dan teknik catat. Peneliti akan membaca, mencermati, menemukan, serta mencatat data yang berkaitan dengan penelitian. Studi pustaka teknik catat merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka. Peneliti setelah melakukan pengumpulan data kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian. Teknik catat ini menggunakan buku-buku, literatur, dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Proses pengumpulan data akan dilakukan peneliti melalui beberapa langkah, yaitu:

- a. Membaca berita terkait konflik separatisme Papua di media surat kabar online secara teliti dan seksama.
- b. Memberi tanda terhadap kata ataupun kalimat yang dianggap dapat menjadi data.
- c. Mengelompokkan data-data hasil temuan penelitian untuk kemudian dilakukan analisis.

E. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Analisis data merupakan proses pendeskripsian dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis data dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian dapat disajikan kepada orang lain tentang data yang telah dikumpulkan di lapangan. Pada tahap ini data yang telah diperoleh akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

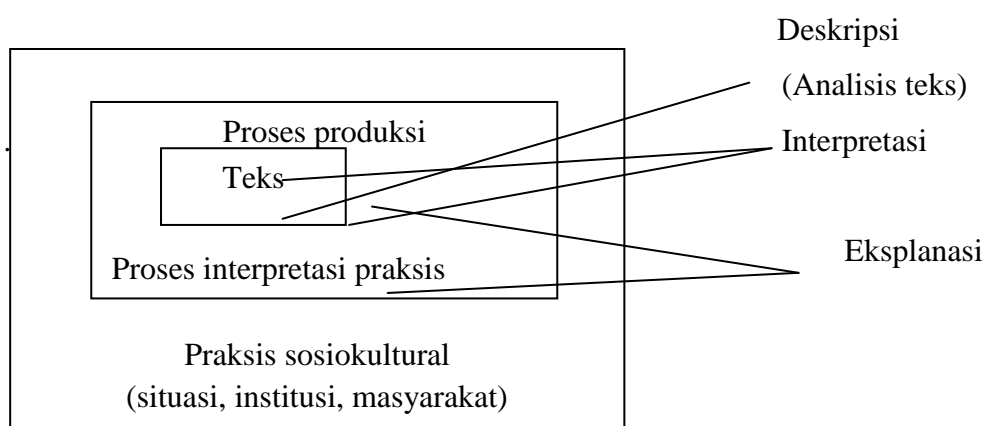
Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) adalah analisis bahasa dengan menggunakan paradigma bahasa kritis. Analisis wacana kritis sering dipandang sebagai oposisi analisis wacana deskriptif. Hal ini karena analisis wacana kritis tidak hanya memandang wacana sebagai fenomena teks bahasa semata-mata. Wacana tidak hanya dipahami semata-mata sebagai kajian bahasa. Analisis wacana kritis menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis dan kemudian menghubungkannya dengan konteks (Santoso, 2008).

Paradigma kritis meletakkan wacana untuk diproduksi, dimengerti, dan ditafsirkan dalam konteks tertentu. Wacana adalah teks dalam konteks. Titik perhatian analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Bahasa selalu berada dalam konteks. Tindakan komunikasi selalu disertai dengan partisipan, antarteks, situasi, dan sebagainya. Analisis Wacana Kritis menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis dan menghubungkannya dengan konteks. Hal ini berarti bahwa bahasa dipergunakan untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk di dalamnya praktik kekuasaan (Santoso, 2008). Paradigma kritis juga mengutamakan analisis yang menyeluruh, kontekstual, dan multilevel. Hal itu

berarti bahwa penelitian kritis menekankan soal *historical situatedness* dalam seluruh kejadian sosial yang ada (Denzin, N.K, & Lincoln, 2005).

Model analisis wacana kritis ini akan menggunakan model analisis wacana kritis Fairclough. Fairclough melihat penempatan dan fungsi bahasa dalam hubungan sosial dalam kekuatan dominan dan ideologi. Analisis wacana kritis melihat bagaimana bahasa menyebabkan kelompok sosial yang ada bertarung dan mengajukan ideologinya masing-masing. Analisis wacana kritis Fairclough menekankan bahwa seorang peneliti harus memiliki kemampuan untuk melihat teks sebagai hal yang memiliki konteks baik berdasarkan “*process of production*” atau “*text production*”; “*process of interpretation*” atau “*text consumption*” (Haryono & Setyawan, 2020).

Gambar 3. Model Analisis Wacana Kritis Fairclough



Dimensi Wacana

Dimensi Analisis Wacana

Sumber: (Fairclough dalam (Suharto dkk., 2020).

Norman Fairclough menawarkan model diskursus yang memuat tiga dimensi, yakni teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Masing-masing dimensi ini memiliki wilayah dan proses masing-masing dan ketiganya berhubungan secara dialektis. Dimensi pertama adalah teks yang merupakan hasil dari proses produksi. dimensi kedua adalah praktik diskursif yang terkait dengan interaksi teks dengan individu atau masyarakat dalam bentuk proses produksi dan interpretasi. Dimensi ketiga adalah praktik sosial atau konteks yang

mencakup praktik-praktik sosiokultural di mana proses produksi dan interpretasi itu berlangsung. Deskripsi digunakan untuk menganalisis teks. Interpretasi digunakan untuk menganalisis proses produksi dan interpretasi teks. Adapun eksplanasi dipakai untuk menganalisis praktik-praktik sosiokultural yang mencakup level situasional, institusional, dan sosial (Elya, 2014, p. 16).

Haryono & Setyawan(2020), Norman fairclough menjelaskan bahwa analisis wacana kritis dibagi dalam tiga dimensi, yaitu:

1. Analisis Mikrostruktur (*Teks*)

Analisis ini menganalisis teks dengan cermat dan teliti, baik secara tertulis maupun lisan (linguistik) serta akan memasukan koherensi dan kohesivitas bagaimana kalimat digabung sehingga membentuk sebuah pemahaman. Analisis mikrostruktur ini akan melihat tiga persoalan, yaitu:

a. Ideasional

Hal ini merujuk pada representasi teks, yaitu bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi atau keadaan yang ditampilkan, umumnya bermuatan ideologi.

b. Relasi

Hal ini merujuk pada bagaimana konstruksi hubungan terkait teks yang disampaikan apakah apakah teks tersebut disampaikan secara tertutup atau terbuka, informal atau formal.

c. Identitas

Hal ini merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas wartawan dan pembaca, serta bagaimana personal dan identitas ini hendak ditampilkan.

2. Analisis Mesostruktur (*Discourse Practice*)

Analisis ini terfokus pada dua aspek yaitu produksi teks dan konsumsi teks. Teks dibentuk melalui Pratik diskursus yang melibatkan bagaimana hubungan antara komunikator dan komunikan, yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi.

3. Analisis Makrostruktur (*Sociocultural Practice*)

Analisis ini terfokus pada dimensi yang berhubungan dengan konteks diluar teks, memang tidak berhubungan langsung dengan produksi teks, tetapi dapat menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami.

Metode analisis wacana kritis Norman Fairclough berusaha menghubungkan antara analisis teks pada level mikro dengan konteks sosial yang lebih besar yaitu *sociocultural practice*. Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough ini.

Langkah-langkah analisis yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti akan melakukan analisis teks. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Data mentah dari buku teks Jurgen Habermas dan temuan data-data konflik separatisme Papua akan dimasukkan ke dalam format ringkasan. Temuan analisis kualitatif didasarkan dari hasil analisa data mentah yang tidak dipengaruhi oleh ekspektasi, asumsi atau hipotesis peneliti maupun teori.
2. Peneliti akan melakukan analisis terhadap praktik diskursif yang terkait dengan interaksi teks dengan individu atau masyarakat dalam bentuk proses produksi dan interpretasi. Peneliti akan melihat praktik-praktik diskursif terkait konflik separatisme yang terjadi di Papua antara OPM dan pemerintah. Pada tahap ini peneliti akan melihat peristiwa yang terjadi sesuai konteks. Konteks dalam hal ini memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana teks tersebut diproduksi. Peneliti akan melakukan analisa yang dilakukan melalui pembacaan dan interpretasi yang berulang terhadap topik yang sedang dianalisa.
3. Peneliti akan melakukan analisis praktik sosial atau konteks yang mencakup praktik-praktik sosiokultural di mana proses produksi dan

interpretasi itu berlangsung. Teks dan konteks akan dimaknai secara bersama-sama. Peneliti akan menganalisa terkait penekanan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi pada konflik separatisme di Papua antara OPM dan pemerintah.

4. Teknik analisis ini sangat mengedepankan analisis interpretasi peneliti. Hasil temuan pada penelitian ini dibentuk oleh asumsi dan interpretasi pribadi peneliti.
5. Peneliti akan membangun model atau konsep berdasarkan temuan-temuan penelitian terkait dengan relevansi pemikiran kritis Jurgern Habermas dalam resolusi konflik separatisme Papua.

Analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini akan secara kritis menganalisis resolusi konflik separatisme yang dilakukan antara Pemerintah dan kelompok separatism dan dilakukan analisis melalui perspektif kritis Jurgern Habermas. Fokus wacana kritis yang dilakukan terletak pada struktur wacana yang membuat, mengkonfirmasi, melegitimasi, mereproduksi, menentang hubungan kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat yang ada pada kelompok separatisme dan pemerintah. Hal ini akan memudahkan dilakukannya analisis akar konflik yang terjadi hingga dapat menemukan wacana baru terkait resolusi konflik separatisme yang terjadi di Papua melalui perspektif kritis Jurgern Habermas.

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum objek penelitian pada tesis ini akan dijelaskan mulai dari sejarah Papua. Peneliti kemudian menjelaskan bagaimana konflik separatime di Papua terjadi. Sejarah gerakan separatime OPM hingga struktur organisasi gerakan separatisme hingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik di tanah Papua akan dijabarkan pada gambaran umum objek penelitian.

A. Sejarah Papua

Pada April 1961 sebagai bagian dari proses dekolonisasi sebuah badan perwakilan pusat berhasil dibentuk, Dewan New Guinea memutuskan untuk mengadopsi "Papua" sebagai nama resmi untuk penduduk asli dan "Papua Barat" sebagai nama negara. Mereka juga menandatangani bendera Bintang Kejora dan lagu kebangsaan “ Hai Tanahku Papua ”. Pada tanggal 1 Desember 1961 Dewan bersama dengan pemerintah kolonial Belanda secara resmi meresmikan lambang nasional Papua yang menegaskan kedaulatan mereka sebagai bangsa (Muhammad, 2013, p. 4).

Papua merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (*Dutch New Guinea*). Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Sejak tahun 1969 hingga 1973 Papua dikenal dengan sebutan Irian Barat. Asal kata Irian adalah Ikut Republik Indonesia Anti-Netherland. Pada

saat rezim pemerintahan Soeharto nama Irian Barat kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto. Presiden Soeharto mengganti nama Irian barat menjadi Irian Jaya pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport. Irian jaya menjadi nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama Irian Jaya kemudian diganti kembali menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua. Kata Papua berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli(Papua.go.id, 2020).

Pada tahun 2004 ada banyak protes yang terjadi di Papua. Hal ini menyebabkan Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia. Papua bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat (Papua.go.id, 2020).

Bangsa Papua memiliki keanekaragaman sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lebih dari 253 bahasa. Luas Papua secara keseluruhan 420.540 km. Papua memiliki tiga wilayah geografis yang berbeda untuk menentukan cara hidup rakyat Papua yaitu daerah pantai yang dihuni oleh nelayan dan pelaut, daerah pegunungan yang dihuni oleh para petani, serta daerah tanah rawa yang sangat jarang penduduknya. Papua memiliki suku bangsa yang sangat Heterogen. Heteroginitas etnik Papua yang tinggi, kebudayaan dan kompleksitas adat serta gerakan sosial di tanah Papua memiliki sejarah yang kompleks dan penuh dengan ketegangan serta konflik (Suryawan, 2016, p. 2).

Papua memiliki kelompok suku asli di Papua terdiri dari 255 suku dengan bahasa yang berbeda-beda pada setiap masing-masing suku. Beberapa suku-suku di Papua tersebut antara lain:

- Ansus
- Amungme
- Asmat
- Ayamaru, mendiami daerah Sorong
- Bauzi

- Biak
- Dani
- Empur, mendiami daerah Kebar dan Amberbaken
- Hatam, mendiami daerah Ransiki dan Oransbari
- Iha
- Komoro
- Mee, mendiami daerah pegunungan Paniai
- Meyakh, mendiami Kota Manokwari
- Moskona, mendiami daerah Merdei
- Nafri
- Sentani, mendiami sekitar danau Sentani
- Souk, mendiami daerah Anggi dan Manyambouw
- Waropen
- Wamesa mendiami daerah sebelah selatan Teluk Wondawa (wandamen)
- Muyu
- Tobati
- Enggros
- Korowai
- Fuy

B. Konflik Separatisme Papua

Separatisme merupakan gerakan yang menjadi salah satu ancaman utama bagi Indonesia. Hal ini karena menyangkut masalah kedaulatan wilayah. Menurut Gault-Williams(1987), Pemisahan diri dari negara berdaulat (*secession*), pembentukan wilayah sendiri (*fragmentation*), pendirian pemerintahan otonom (*autonomy*), dan penentuan nasib sendiri (*self determination*) adalah konsep-konsep yang menjadi cakupan dari separatisme

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia mencatat gerakan separatis telah ada sejak awal kemerdekaan dan beberapa diantaranya masih eksis hingga saat ini meskipun tidak secara jelas tampak melakukan perlawanan seperti pada awal

kemunculannya. Beberapa diantaranya adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua.

Pergolakan yang bernuansa separatisme di Papua bertujuan untuk menuntut kemerdekaan kepada pemerintah pusat atas tanah Papua. Konflik separatisme yang terjadi di Papua selain dipicu oleh banyak hal, seperti kemiskinan, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial, dan beberapa hal lain juga dikarenakan wilayah Papua yang berada pada wilayah paling ujung timur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini sangat rentan terjadi gerakan separatis yang melawan Pemerintah Pusat.

Separatisme merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan oleh para aktor non-negara melalui segala bentuk aktivitas yang merongrong dan mengganggu hingga berakibat ancaman terhadap integritas wilayah dan kedaulatan, serta kelangsungan dan masa depan negara. Gerakan separatisme Papua dinilai mampu membahayakan eksistensi NKRI dibandingkan dengan implikasi yang ditimbulkan oleh konflik teritorial akibat klaim kedaulatan wilayah. Keberadaan para pelaku dan simpatisan gerakan separatisme Papua di mancanegara atau dalam pengasingan akan menyebabkan masalah-masalah domestik Papua kian terekspos dan terbuka lebar untuk diketahui dan diintervensi, khususnya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tidak memihak pada kelompok pribumi Papua (Nainggolan, 2016, p. 185).

Kelompok separatisme melakukan pemberontakan kepada negara untuk menuntut kemerdekaan atas tanah Papua. Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok separatisme ini menamai gerakan mereka dengan istilah OPM (Organisasi Papua Merdeka). OPM memulai perlawanan bersenjata semenjak pertengahan tahun 1960. Pada awal pergerakannya, dukungan masyarakat lokal terhadap OPM relatif sangat terbatas. Sekitar tahun 1970 setelah Freeport beroperasi mendulang emas dan bahan tambang lainnya di penguangan Gresik, popularitas dan dukungan terhadap OPM dari masyarakat lokal pun

meningkat. Pemerintahan sentralistis dan pendekatan keamanan yang diterapkan oleh rezim Orde Baru tidak dapat menyelesaikan konflik di Papua, bahkan semakin memperdalam ketertindasan dan rasa permusuhan (Martanto, 2007, p. 176).

Gerakan separatisme Papua merupakan ancaman terbesar yang dihadapi oleh Indonesia sepanjang tahun 2014 – 2019. Indonesia lebih siap menghadapi ancaman dari teroris, cyber, organisasi Internasional dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) jika dibandingkan dengan ancaman dari gerakan Separatisme OPM(Sabir, 2018, p. 92).

C. Sejarah Gerakan Separatisme OPM

Sejarah gerakan separatism di Papua bermula dari cerita panjang saat terjadi integrasi Papua dengan Indonesia. Proses intergrasi Papua menjadi bagian dari Indonesia tercatat dalam suatu perjuangan yang relatif panjang. Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia berdasarkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969, yang dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 2504 dalam sidang 19 November 1969 (Sugiyatno, 2017).

Hal ini berawal dari Perjanjian New York yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Berdasar isi perjanjian tersebut, pada 1 Oktober 1962, dilakukan penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Integrasi Papua ke Indonesia juga diperkuat dengan pengakuan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) yang menyerahkan kekuasaan administrasi tersebut kepada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963.

Pada 1 Mei 1963 sejak *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) menyerahkan Papua kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini Papua masih menyimpan segudang permasalahan yang rumit. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan berbagai kebijakan pembangunan dalam berbagai sektor sebagai upaya menumbuhkan kesadaran nasional. Namun, kebijakan pembangunan yang dilakukan hanya pada bidang sosial, keamanan, dan politik. Situasi sosial, ekonomi, dan politik Papua antara 1963 sampai dengan 1969 tetep menjadikan kondisi yang sangat memilukan bagi masyarakat. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Papua. Ekspresi kekecewaan masyarakat ini secara ekstrim muncul dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang meletus sejak 26 Juli 1965 (Yambeyapdi, 2019, p. 94).

OPM melakukan aksi pemberontakannya juga dipicu karena lahirnya PNG sebagai negara merdeka pada tanggal 16 September 1957. Letak Papua Barat yang berada diujung timur Indonesia dan berbatasan dengan PNG merupakan sumber inspiratif bagi beberapa kalangan didaerah itu untuk tetap mempertahankan OPM. Sikap anti-Indonesia di Papua Barat juga lahir akibat dari pembangunan didaerah itu terabaikan, adanya dominasi pendatang terhadap penduduk asli, para pejabat non-Papua Barat memandang rendah orang Papua Barat sebagai warga negara kelas dua, para transmigran lebih mendapat bantuan daripada penduduk asli, dan kesempatan kerja bagi para penduduk asli amat terbatas; masalah ekonomi, sosial, politik, dan hankam (Mishael et al., 2016, p. 6).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan nama yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada setiap organisasi atau fraksi baik di Papua maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Papua yang pada mulanya bergerak di bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintah Indonesia, baik secara politik maupun secara fisik bersenjata dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Papua lepas dari Indonesia. Gault-Williams(2019, p. 32) Orang Papua telah berjuang untuk

kemerdekaan di Papua sejak pertengahan 1960-an, dipimpin oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM-Gerakan Papua Merdeka). Pemberontakan yang dilakukan oleh OPM pertama kali dipimpin oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awom. Sersan Mayor Permanes Ferry Awom mantan anggota batalyon sukarelawan Papua (PVK/Papua Vrijwilligers Korp) hasil ciptaan Belanda.

Pada tahun 1967 terjadi pemberontakan Ayamaru yang dipimpin oleh Abner Asmuruf dan juga pemberontakan Arfak yang dipimpin oleh saudara-saudara Mandatjan. Pada tahun yang sama terjadi pemberontakan Biak Utara yang dipimpin oleh Awom lainnya (Gault-Williams, 2019, p. 35).

Sejak awal kemunculannya, OPM telah terlibat dalam kegiatan “ilegal” yang menantang otoritas Indonesia, seperti proklamasi kemerdekaan Republik Sementara Papua Nugini dalam “Markas Victoria” oleh Seth Rumkorem pada tahun 1971, berbagai “Bintang Kejora” upacara pengibaran bendera, serangan bersenjata ke pos tentara dan polisi Indonesia, penyanderaan, dan mencari dukungan internasional. Di setiap kota, OPM juga menyebarluaskan informasi tentang tujuan OPM (Muhammad, 2013, p. 7).

OPM sebagai perwujudan gerakan separatisme di Papua masih menjadi gerakan yang menyebarkan pemikiran untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan OPM memiliki persepsi bahwa Papua akan lebih cepat berkembang jika berpisah dari Indonesia.

Gault-Williams (2019, p. 37) dalam tulisannya menjelaskan bahwa ketika orang Papua memiliki tuntutan untuk menentukan nasibnya sendiri. Orang Papua merasa bahwa pelaksanaan penentuan nasib sendiri telah dikesampingkan karena tekanan AS memaksa Belanda untuk meninggalkan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. "Solusi" ini - "Perjanjian New York," yang diratifikasi oleh Majelis Umum PBB - mengabaikan pendapat orang Papua dan menempatkan mereka pada belas kasihan penguasa baru mereka. Hal inilah

yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya gerakan-gerakan separatism di tanah Papua.

OPM tersebut dapat oleh pemerintah Indonesia dianggap sebagai suatu perbuatan makar dari suatu kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah (*fighting against the legitimate government*). Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan politik dan militer untuk meredam keinginan OPM mencapai kemerdekaan atas tanah Papua.

D. Struktur Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka berasal dari Front Nasional Papua (FNP). FNP merupakan sebuah front perlawanan awal yang diorganisir oleh para eksil politik di Belanda, Nicolaas Jouwe dan Franz Kaisiepo. Pendiri OPM berasal dari suku Arfak, banyak di antaranya pernah dilatih di Korps Relawan Papua bentukan Belanda (Gault-Williams, 2019, p. 36).

Awal kemunculan OPM sejatinya telah mengalami perpecahan terutama yang memilih jalan kekerasan dan jalan politis. Adapun dua faksi yang dikenal secara umum sebagai cikal bakal OPM saat ini, yakni faksi Aser Demotekay dan faksi Terianus Aronggear. Faksi Aser Demotekay sejatinya telah ada sejak 1963 namun baru muncul kepermukaan pada tahun 1970 di Jayapura. Faksi ini memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan cara-cara anti kekerasan berdasarkan gerakan kargoisme dan spiritual Kristen (Webster, 2001).

Faksi OPM yang kedua ialah Terianus Aronggear yang berdiri tahun 1964 di Manokwari menghendaki perjuangan dengan cara kekerasan. Adapun pengikut dari Terianus Aronggear ini adalah Permenas Ferry Awom yang melakukan serangan di Kebar, Manokwari 1965 yang serangannya sering dianggap sebagai kemunculan OPM. Serangann ini juga dilakukan karena kekecewaan

Awom atas ditangkapnya Terianus Aronggear di Biak 12 Mei 1965 karena menyelundupkan dokumen untuk PBB ke Papua Nugini (Aditjondro, 2000)

Para pemimpin awal OPM seperti Johan Ariks pernah turun ke bukit ketika berusia pertengahan tujuh puluhan. Kepemimpinan kemudian beralih ke Lodewijk Mandatjan dan Perminas dan Frits Awom. Gerakan ini akhirnya berada di bawah kepemimpinan ganda Seth Rumkorem dan Jacob Prai. Rumkorem adalah seorang Papua yang pernah menjadi perwira intelijen Indonesia, mendukung permintaan senjata dari pemerintah komunis dan disergap pada bulan Mei 1977 oleh gerilyawan Papua yang setia kepada Prai. Jacob Prai, tidak seperti Rumkorem, selalu menentang orang Indonesia. Jika Rumkorem memiliki pengalaman militer, Prai memiliki pengetahuan tentang gerakan bawah tanah Papua (Gault-Williams, 2019, p. 37)

Organisasi Papua Merdeka terbagi dalam tujuh komando daerah yang masing-masing terdiri dari sejumlah besar pos yang disebut basis. Menurut Jacob Prai, orang yang memimpin setiap basis bertanggung jawab atas perencanaan militer dan kegiatan masyarakat. Setiap komando regional memiliki 1.000 hingga 3.000 gerilyawan terlatih yang melekat padanya. Wanita juga merupakan bagian yang cukup signifikan dari pasukan (Gault-Williams, 2019, p. 37).

Pada awal pergerakannya, masalah logistik OPM yang paling serius adalah kurangnya senjata modern dan kekurangan obat-obatan. Senjata yang paling banyak digunakan adalah busur dan anak panah, tombak, dan tulang kasuari yang panjang dan tajam. Sebagian besar senjata api adalah senapan Perang Dunia II, sisa-sisa dari zaman Belanda, atau senjata yang dirampas dari ABRI. Seth Rumkorem mengatakan, pasukan OPM hanya memiliki total 300 pucuk senjata. Namun dalam beberapa kesempatan, Papeal berhasil menembak jatuh pesawat musuh, sebagaimana didokumentasikan dalam dokumen internal militer Indonesia. Sedangkan untuk perawatan medis, tidak hanya terjadi kekurangan obat yang kritis, tetapi juga ketiadaan tenaga medis yang terlatih. Prai mengatakan perawat "melakukan operasi dengan menggunakan serat nanas atau serat dari daun pisang untuk jahitan. Tetapi, untuk luka yang lebih

serius, keterampilan kita terlalu terbatas untuk mengatasi. Dengan tenaga medis yang lebih berkualitas, kita akan bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa”. Sebagian besar dari mereka Obat yang kami gunakan adalah obat tradisional yang berasal dari akar atau daun (Gault-Williams, 2019).

Rumkorem menyatakan bahwa OPM secara efektif menguasai seperempat wilayah Papua Barat dan 10 persen militer Indonesia. "Perluasan zona dibebaskan hanya dibatasi oleh masalah pasokan, komunikasi dan organisasi. Adapun besaran sebenarnya dari kekuatan Gerakan Papua Merdeka, Rumkorem menyebutkan ada 30.000 orang Papua yang aktif di seluruh nusantara (Gault-Williams, 2019).

OPM dalam perjalanannya telah melakukan beberapa kali deklarasi kemerdekaan. Pada tahun 1961 deklarasi kemerdekaan pertama OPM di Lapangan Imbi, Jayapura. Deklarasi ini dilakukan dibawah Dewan Nugini yang masih dalam pengawasan Belanda, diresmikanlah bendera Bintang Kejora sebagai bendera nasional dan Lagu “Hai Tanahku Papua” sebagai lagu kebangsaan Papua Barat (Papua). Pada tahun 1965, deklarasi dilaksanakan di Kebar dipimpin oleh Lodwick dan Barren Mandatjan. Pada tanggal 1 Juli 1971 deklarasi kemerdekaan dilakukan oleh kelompok OPM Seth Rumkorem, Jacob Prai, Jarisetou Jufuway, dan Loui Wajoi di Desa Waris atau Marvic. Deklarasi ini terjadi sebelum OPM terpecah antara faksi Jacob Prai dengan Seth Rumkorem. Di tahun 1974, juga dilaksanakan Deklarasi Negara Melanesia Barat yang meliputi Sorong hingga Samarai. Selanjutnya, deklarasi kemerdekaan kembali dilakukan pada tahun 1988 yang digagas oleh Dr. Thomas Wanggai (Paramitha, 2019).

E. Peta Serangan Gerakan Separatisme Papua

Aditjondro (2000, p. 35) menjelaskan awal gerakan OPM adalah serangan yang dilakukan pada Juli 1965 sekelompok orang dari suku Arfak ke barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) di Manokwari. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang meletus sejak 26 Juli 1965 merupakan cerminan nyata masalah integrasi nasional. Gerakan yang dimulai dari Manokwari ini dipimpin oleh Serma Permenas Ferry Awom, mantan Anggota Batalyon Sukarelawan Papua (Papua Vrijwillegers Korps). Papua Vrijwillegers Korps merupakan kelompok bentukan Belanda (Yambeyapdi, 2019, p. 92).

Penyerangan ini dipicu oleh penolakan para anggota PVK Batalyon Papua dari suku Arfak dan Biak yang hendak di mobilisasi. Pemberontakan OPM meluas ke sejumlah Kabupaten di Irian Jaya seperti Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Yapen Waropen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Aksi pemberontakan ditandai oleh tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, penyebaran dan penempelan pamphlet, serta berbagai aksi perusakan. Aksi-aksi tersebut menyebabkan tingginya perlintasan di wilayah perbatasan menuju Papua Nugini (Djopari, 2003).

Paramitha (2019) menjelaskan berbagai serangan yang dilakukan oleh gerakan separatism OPM sebagai berikut:

1. 1965 pada Peristiwa Kebar yakni pasukan Johannis Djambuani menyerang upacara Sumpah Prasetya yang menimbulkan tiga korban jiwa dan hilangnya 9 pucuk senjata. Selain itu, serangan yang dianggap sebagai kemunculan OPM adalah peristiwa penyerangan Yonif 641 Cendrawasih I di Arfai dibawah pimpinan Permenas Ferry Awom (Djopari, 2003). Peristiwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 3 orang dari pihak TNI dan 30 orang dari pihak OPM.

2. Pada tahun 1967 dan 1968 serangan di Sukorem dan Ransiki oleh Jacob Rumbiak dan kawan-kawan menyebabkan 13 orang dari pihak OPM tewas.
3. Peristiwa Irai Anggi 1968 menyebabkan munculnya 5 orang korban meninggal dunia dan 38 pucuk senjata dirampas dibawah pasukan Joseph Indey yang menyerang Komplek II 341 Siliwangi.
4. Selanjutnya adalah peristiwa Enarotali 1969 oleh OPM Bernadus Wally yang menyerang kampung Dubu dan menewaskan 3 orang TNI. Peristiwa ini berlangsung cukup lama dari Februari 1969 hingga 30 Agustus 1969 yang mana mereka bertujuan untuk mengembangkan ideologi anti Indonesia.
5. Kemudian, tahun 1977 – 1978, OPM melakukan serangan pada pos-pos militer diantaranya pos Kabakma, pos Makki, pos Petriner, pos Kurubaga, dan pos Tiom. Tindakannya kemudian berubah menjadi pola-pola penyanderaan yang mana tahun 1979, OPM Marten Tabu menyandera seorang Camat Arso, Billy W. Jamlean.
6. Kemudian tahun 1987, OPM Tadius Yoghi dan Daniel Kogoya menyandera 5 warga sipil untuk mendapatkan tebusan sebesar 2 milyar rupiah. Tahun 1995 dan 1996, OPM Tadius Yoghi, Kelly Kwalik, dan Daniel Kogoya secara terpisah menyandera 3 orang peneliti di Paniai dan 25 orang yang terdiri dari 12 penduduk, 10 peneliti dari Tim Ekspedisi Lorens, 3 periset WWF dan UNESCO, yang mana 7 di antaranya adalah Warga Negara Asing (WNA).
7. Bulan Juli 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di menara air kota Biak di pulau Biak. Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum militer Indonesia membubarkan mereka. Filep Karma termasuk di antara orang-orang yang ditangkap.

8. Tanggal 24 Oktober 2011, Dominggus Oktavianus Awes, kepala polisi Mulia, ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya. Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM. Rangkaian serangan terhadap polisi Indonesia memaksa mereka menerjunkan lebih banyak personel di Papua.
9. Pada tanggal 21 Januari 2012, orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung. Ia adalah transmigran asal Sumatera Barat.
10. Tanggal 8 Januari 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI. 4 lainnya juga cedera.
11. Tanggal 31 Januari 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kilogram obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Obat-obatan tersebut diduga akan dijual di Jayapura.
12. Tanggal 8 April 2012, OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat yang akan parkir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Lima militan bersenjata OPM tiba-tiba melepaskan tembakan ke pesawat, sehingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan. Satu orang tewas, yaitu Leiron Kogoya, seorang jurnalis Papua Pos yang mengalami luka tembak di leher. Pilot Beby Astek dan Kopilot Willy Resubun terluka akibat pecahan peluru. Yanti Korwa, seorang ibu rumah tangga, terluka di lengan kanannya dan anaknya yang berusia 4 tahun, Pako Korwa, terluka di tangan kirinya. Pasca-serangan, para militan mundur ke hutan sekitar bandara. Semua korban adalah warga sipil.
13. Tanggal 1 Juli 2012, patroli keamanan rutin yang diserang OPM mengakibatkan seorang warga sipil tewas. Korban adalah presiden desa

setempat yang ditembak di bagian kepala dan perut. Seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca.

14. Tanggal 9 Juli 2012, tiga orang diserang dan tewas di Paniai, Papua. Salah satu korban adalah anggota TNI. Dua lainnya adalah warga sipil, termasuk bocah berusia 8 tahun. Bocah tersebut ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada.

15. 1 Desember 2018, Sebanyak 31 pekerja jembatan di Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga dibunuh kelompok kriminal bersenjata bagian dari faksi militer OPM. Pembunuhan itu dilakukan pada hari Papua Merdeka.

F. Pendekatan Operasi Militer Pemerintah Indonesia

Pendekatan militer adalah berbagai operasi yang dilakukan oleh militer untuk menumpas pemberontakan OPM yang dimulai sejak awal pemberontakan. Kebijakan operasi militer untuk menumpas OPM dilakukan dengan nama tersendiri sesuai dengan kebijakan pimpinan militer Indonesia. Bentuk-bentuk operasi militer yang digunakan di Papua Barat merupakan operasi teritorial, operasi intelijen dan operasi tempur (Mishael dkk, 2016 : 6).

TNI memiliki tugas pokok yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pasal tersebut menjelaskan bahwa TNI memiliki tugas untuk menegakkan kedaulatan negara; mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok TNI dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMPS) yang

dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal tersebut berarti bahwa pengerahan kekuatan TNI untuk melakukan OMP maupun OMSP sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan negara sehingga TNI tidak dapat bertindak sepihak dalam melaksanakan OMP dan OMPS.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dalam Bab IV mengenai Pengelolaan Sistem Pertahanan Negara menjelaskan bahwa presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, dalam pengelolaan sistem pertahanan negara Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Presiden dalam hal ini juga memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan TNI dan dalam kewenangannya harus mendapat persetujuan dari DPR sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan dipertegas kembali oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada Bab VI mengenai pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sangat berhubungan dengan keadaan suatu negara tersebut. Ada kalanya suatu negara hidup dalam keadaan tertib namun ada juga negara yang tidak dalam keadaan tertib atau dalam situasi bahaya.

Dasar hukum keadaan darurat atau bahaya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya yang diundangkan pada tanggal 16 Desember 1959. Undang-Undang ini menjelaskan pemberlakuan keadaan bahaya sesungguhnya adalah kewenangan dari presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Hal ini menegaskan bahwa tahap pertama dalam mekanisme penetapan keadaan bahaya yang wajib dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya deklarasi atau pernyataan keadaan bahaya di wilayah Republik Indonesia.

Mishael et al(2016, p. 7) Operasi militer yang paling sering dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah operasi tempur. Operasi tempur kerap menjadi kebijakan dan perwujudan sikap politik pemerintah Indonesia di Papua. Berikut adalah beberapa operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat untuk mengatasi OPM :

1. Operasi Wisnumurti
2. Operasi Sadar
3. Operasi Bharatayuda
4. Operasi Pamungkas
5. Operasi Koteka
6. Operasi Senyum
7. Operasi Gagak I
8. Operasi Gagak II
9. Operasi Kasuari I
10. Operasi Kasuari II
11. Operasi Rajawali I
12. Operasi Rajawali II

G. Pendekatan Otonomi Khusus

Arah kebijakan Papua dalam kerangka desentralisasi asimetrik diletakkan dalam konteks kekhususannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua (UU Otsus). Berdasarkan undang-undang tersebut, kebijakan khusus bagi Papua diperlukan “dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua [. . .] dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Citrawan, 2015:280).

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua juga harus menggunakan *special treatment* guna mendorong pembangunan yang inklusif di tengah masyarakat Papua. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 38 yang mengatur bahwa:

- (1) Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.
- (2) Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

Konflik muncul ketika regulasi otonomi khusus yang berlaku tersebut belum mampu secara maksimal dioperasionalkan oleh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Papua. Desentralisasi asimetris merupakan bagian dari politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam menuju kepada desentralisasi yang lebih menghargai keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Desentralisasi asimetris menerapkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menghormati keberagaman daerah. Desentralisasi asimetris memberlakukan kewenangan khusus pada daerah-daerah tertentu karena dianggap dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Desentralisasi asimetris diatur dalam perundang-undangan Pasal 18A UUD Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan beberapa point, yaitu: hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Berdasarkan penjelasan Pasal 18A UUD 1945 tersebut dapat dipahami bahwa

desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan keistimewaan pada setiap daerah. Desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus merupakan perwujudan desentralisasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah (Bonso, 2019, p. 37).

Pemerintah berharap dengan diterapkannya sistem pemerintahan desentralisasi asimetris akan memberikan pengaruh dalam penyelesaian konflik separatisme di Papua. Desentralisasi asimetris diberlakukan untuk menghindari konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua. Kenyataan yang terjadi sebaliknya. Desentralisasi asimetris atau otonomi khusus (otsus) Papua masih buram. Desain besar Otsus Papua tak pernah jelas. Kebijakan yang muncul setelah Otsus, justru membuat jalan pencapaian Otsus semakin jauh (Dardias, 2012).

Peneliti LIPI Rosita Dewi mengatakan terdapat perspektif yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat Papua terkait implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Rosita menjelaskan bahwa terdapat GAP perspektif dalam melihat Otsus. Otsus dalam kacamata pemerintah, berhasil, tetapi bagi Papua Otsus itu gagal (Sari, 2020).

Dana otonomi khusus yang selalu mengalami peningkatan juga belum mampu memberikan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Masyarakat Papua menganggap bahwa dana otsus sebagai kompensasi dari separatisme bias dikatakan gagal karena tidak membawa perubahan secara signifikan. Kegagalan distribusi dana otsus setidaknya disebabkan oleh kurangnya kapasitas dari pemerintah lokal dan kurangnya *political will* dari pemerintah pusat (Tryatmoko, 2016).

Penerapan desentralisasi asimetris yang awalnya diharapkan dapat menjadi jalan tengah dalam penyelesaian konflik yang terjadi ternyata belum

memberikan perkembangan yang berarti. Desentralisasi asimetris bagi Papua ternyata belum juga mampu meredam konflik berkepanjangan yang tengah terjadi. Desentralisasi asimetris belum membuahkan hasil yang signifikan. Pasca diterapkannya desentralisasi konflik masih banyak terjadi di tanah Papua. Konflik masih terus berkecamuk karena rakyat Papua merasa belum mendapatkan penyelesaian masalah yang berpihak pada kepentingan rakyat Papua oleh Pemerintah Pusat. Sumber daya alam Papua yang melimpah masih belum mampu mengantarkan rakyat Papua keluar dari jeratan permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan.

V. KESIMPULAN& SARAN

A. Kesimpulan

Habermas menawarkan teori tindakan komunikasi untuk menyelesaikan perbedaan antara aktor-aktor yang berkonflik dalam mencapai sebuah kesepakatan. Habermas membayangkan manusia saling berinteraksi satu sama lain untuk melakukan pertukaran ide, pengetahuan, dan informasi. Habermas juga membayangkan bahwa melalui komunikasi orang akan membahas solusi untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi. Rumusan Habermas ini yang dikenal dengan teori tindakan komunikatif Habermas yang ia tulis dalam bukunya *The Theory of Communicative Action*. Habermas menjelaskan gagasannya tentang perlunya interaksi itu untuk membangun kesepakatan bersama dalam sebuah masyarakat. Setiap orang harus menyampaikan gagasannya sehingga orang lain tahu. Gagasan utama dalam teori tindakan komunikatif Habermas adalah bahwa komunikasi membuka jalan untuk saling memahami antaraktor sehingga sampai pada kesepakatan bersama. Jalan untuk mencapai kesepakatan perdamaian itu adalah dengan cara para aktor mau berdialog.

Perspektif Habermas ini jika digunakan untuk melihat konflik yang terjadi di Papua, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah dalam beberapa kebijakannya masih kerap menggunakan komunikasi instrumental dalam resolusi konflik separatisme yang terjadi di Papua, walaupun beberapa kebijakan juga sudah mulai mengarah pada tindakan yang sifatnya komunikatif.
2. Komunikasi instrumental terlihat dari pidato Presiden Jokowi yang secara tegas memerintahkan TNI Polri untuk melakukan pengejaran dan

penangkapan atas kasus penyerangan para pekerja Trans-Papua oleh kelompok separatism. Tindakan instrumental juga terlihat dari pers release resmi pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD yang memberikan pernyataan bahwa pemerintah melakukan tindakan tegas untuk memasukkan KKB dan segala organisasi yang terafiliasi dengannya menjadi terorisme. Penerapan UU NO 5 Tahun 2018 tentang terorisme sehingga menjadikan kelompok separatism di Papua menjadi agenda hukum masih menunjukkan komunikasi instrumental yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan *critical discourse analysis* Norman fairclough memperlihatkan praktik diskursif yang terjadi adalah tindakan dan praktik kekuasaan yang cenderung mendominasi melalui komunikasi instrumental.
4. Pemerintah dilain sisi sudah mulai melakukan wacana penyelesaian konflik yang terjadi di Papua melalui jalur dialog. Pemerintah juga sudah mulai melakukan pertemuan dengan para tokoh Papua untuk membicarakan masalah yang terjadi di Papua. Hanya saja, sejauh ini para pertemuan dengan para tokoh bukanlah dari pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Oleh karena itu perlu pertemuan dengan pihak yang bersebrangan.
5. Pemerintah perlu melakukan pertemuan dan melakukan tindakan komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan dengan kelompok-kelompok separatism yang bersebrangan dengan pemerintah untuk duduk bersama membicarakan masalah Papua.
6. Tindakan komunikasi merupakan hal yang cukup penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Papua. Pendekatan melalui tindakan komunikasi diharapkan dapat menjadi alternatif pendekatan yang harus lebih dikedepankan. Tindakan komunikatif seperti yang disampaikan Habermas menjadi alternatif lain pemecah kebuntuan dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua.
7. Perdamaian atas konflik yang tengah terjadi menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat tercapai melalui tindakan komunikasi. Tindakan komunikasi yang efektif dengan memperhatikan situasi percakapan yang ideal antar

kedua belah pihak. Tindakan komunikasi memegang peranan penting dalam interaksi untuk menghasilkan solusi atas konflik berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua. Konsensus atas konflik yang tengah terjadi bukan sebuah kemustahilan, tetapi adalah sebuah keniscayaan.

8. Komunikasi intersubjektif seperti yang digagas Habermas dapat menjadi alternatif pendekatan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Papua.

B. Saran

Berikut saran yang memungkinkan untuk dilakukan dalam resolusi konflik separatism Papua.

1. Penyelesaian konflik melalui komunikasi instrumental perlu dikaji ulang dalam usahanya melakukan resolusi konflik yang terjadi di Papua.
2. Penyelesaian konflik melalui tindakan komunikasi aktif Jurgen Habermas yang mengedepankan komunikasi intersubjektif dapat menjadi alternatif pendekatan yang memungkinkan untuk dilakukan dalam resolusi konflik separatism Papua.
3. Pendekatan komunikasi intersubjektif yang dibangun adalah sebuah tindakan komunikasi yang dilakukan tanpa adanya praktik dominasi kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A. (2016). *Refleksi Teori Kritis Jurgen Habermas atas Konsesus Simbolik Perda Syariah*. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 16(1).
- Adat Sudrajat. (2014). *Jurgen habermas: teori kritis dengan paradigma komunikasi*. Journal Article.
- Aditjondro, G. J. (2000). *Cahaya Bintang Kejora; Papua dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan HAM*. Elsham.
- Arnani, M. (2019). *Kerusuhan di Papua, Apa yang Terjadi di Manokwari hingga Jayapura?* Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/29/183000065/kerusuhan-di-papua-apa-yang-terjadi-di-manokwari-hingga-jayapura-?page=all>
- Astri, H. (2011). *Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal*. Jurnal Aspirasi, 2(2).
- Bbc.com. (2019). *Papua: Kapolri buka pintu dialog dengan OPM asal "tak ada permintaan yang berlebihan."* Bbc.Com.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49585082>
- Bernie, M. (2019). *Kondisi Kesehatan di Papua Disebut Tak Berubah 20 Tahun Terakhir*. Terto.Id. <https://tirto.id/kondisi-kesehatan-di-papua-disebut-tak-berubah-20-tahun-terakhir-elKm>
- Bhakti, I. N., & Pigay, N. (2012). *Menemukan Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik Papua Suspenkah?* Jurnal Penelitian Politik, Vol 9.
- Bolton, R. (2005). *Habermas ' S Theory of Communicative Action and the Theory of Social Capital*. Association of American Geographers, 1(3).
- Bonso, H. (2019). *Efektivitas Network Governance dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Provinsi Papua*. Qiara Media.
- Corchia, L. (2015). *The Frankfurt School and the young Habermas: Traces of an intellectual path (1956–1964)*. Journal of Classical Sociology, 15(2).
<https://doi.org/10.1177/1468795X14567281>

- Cukier, W., Bauer, R., & Middleton, C. (2004). *Applying Habermas' validity claims as a standard for critical discourse analysis*. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 143. https://doi.org/10.1007/1-4020-8095-6_14
- Dardias, B. (2012, July 13). *Menakar Otonomi Khusus Aceh dan Papua*. Kompas. <http://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Menakar-Otonomi-Khusus-Aceh-dan-Papua-Kompas-3-Juli-2012.pdf>
- Delvia Ananda Kaisupy, S. G. M. (2021). *Proses Negoisasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 10.
- Denzin, N.K, & Lincoln, Y. S. (2005). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*: Amazon.co.uk: Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln: 9780761927570: Books. Sage, January 2007.
- Dermawan, A. (2013). *Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan*. Sosiologi Reflektif, 8(1).
- Djopari, J. R. (2003). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Grasindo.
- Elya, M. (2014). *Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough*. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Vol 8(No 1).
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*.
- Gatra.com. (2010). *JUSUF KALLA: Tangan Dingin Pemadam Api Konflik*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/detail/news/22575-jusuf-kalla-tangan-dingin-pemadam-api-konflik>
- Garnesia, I. (2019). *Penambahan Personel TNI-Polri: Papua Semata "Aset Vital Nasional."* Tirto.Id. <https://tirto.id/penambahan-personel-tni-polri-papua-semata-aset-vital-nasional-ehsb>
- Gault-Williams, M. (1987). *Organisasi Papua Merdeka: The Free Papua Movement Lives*. Critical Asian Studies, 19(4). <https://doi.org/10.1080/14672715.1987.10409792>
- Gault-Williams, M. (2019). *Organisasi Papua Merdeka: The free Papuamovement lives*. Ulletin of Concerned Asian Scholars, 19(4).
- Gewati, M. (2019). *Alasan Pemerintah Jokowi-JK Fokus Bangun Infrastruktur*. Kompas.Com.

<https://money.kompas.com/read/2019/03/26/084500826/alasan-pemerintah-jokowi-jk-fokus-bangun-infrastruktur?page=all>

- Habermas, J. (1981). *Teori Tindakan Komunikatif I: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. Kreasi Verlag.
- Hadirman, B. (1993). *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Kanisius.
- Harnowo, T. (2020). *Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Pnyelesaian Sengketa*. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1). <https://doi.org/10.22146/jmh.45145>
- Haryono, C. G., & Setyawan, D. (2020). *Makna Dibaik Pesan Politik Presiden Jokowi (Analisis Wacana Kritis Fairclaugh Terhadap Pernyataan Sikap Presiden Joko Widodo Menanggapi Kerusuhan Rasial di Papua dan Papua Barat)*. *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 7(2). <https://doi.org/10.33592/dk.v7i2.358>
- Hasan, A. M. (2018). *Farid Husain Merintis Perdamaian GAM-RI lewat Perjanjian Helsinki*. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/farid-husain-merintis-perdamaian-gam-ri-lewat-perjanjian-helsinki-cSi6>
- Ihsanuddin. (2019). *Jokowi Minta Masyarakat Papua Maafkan Pihak yang Buat Mereka Tersinggung*. *Kompas.Com2*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/19/18022971/jokowi-minta-masyarakat-papua-maafkan-pihak-yang-buat-mereka-tersinggung>
- Indellicato, M. (2020). *Ethics of communicative action and human rights in Habermas*. *Journal of Modern Science*, 43(4). <https://doi.org/10.13166/jms/117988>
- Iqbal, M. (2019). *Temui Tokoh Papua, Wiranti: Kita Sepakat Akhiri Ketegangan*. *Cnbcindonesia.Com*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190830151209-4-95997/temui-tokoh-papua-wiranti-kita-sepakat-akhiri-ketegangan>
- Jayani, D. H. (2019). *Alasan Putus Sekolah Terbanyak di Papua karena Tidak Ada Biaya*. *Katadata.Co.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/alasan-putus-sekolah-terbanyak-di-papua-karena-tidak-ada-biaya>
- Lubabah, R. G. (2016). *Kronologi pengepungan mahasiswa Papua di*

Yogyakarta.

Merdeka.Com.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-pengepungan-mahasiswa-papua-di-yogyakarta.html>

Lyytinen, K. J., & Klein, H. K. (1985). *The Critical Theory of Jurgen Habermas as a Basis for a Theory of Information Systems. In Research Methods in Information Systems.*

Magnis-Suseno, F. (1987). *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis.* Kanisius.

Mambraku, N. S. T. (2015). *Penyelesaian Konflik Di Tanah Papua Dalam Perspektif Politik.* Jurnal Kajian, 20(2).

Martanto, U. (2007). *Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan Membaca Papua Melalui Pendekatan Environmental Security.* Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 11(2).

McCarthy, T. (1982). *Teori Kritis Jurgen Habermas.* MIT Press.

Minnery, J. R. (1985). *Conflict Management in Urban Planning.* shgate Publishing Limited.

Mishael, G., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). *Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.* Diponegoro Law Journal, 5(2).

Mitrović, L. (1999). *New Social Paradigm : Habermas ' S Theory Communicative Action.* Ljubiša Mitrović. In *Philosophy and Sociology- The Scientific journal of Facta Universitatis* (Vol. 2).

Moelong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya.

Muhammad, A. (2013). *The Historical Origins of Secessionist Movement in West Papua.* In *Journal of Asia Pacific Studies* (Vol. 3, Issue 1).

Muttaqin, A. (2014). *Otonomi Khusus Papua Sebuah Uapaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua.* POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik, 4(1).
<https://doi.org/10.14710/politika,4,1,5-18>

Nainggolan, P. P. (2016). *Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua.* Kajian, 19(3).

Nugroho, A. H., & Sardini, N. H. (2019). *Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian*

Konflik Vertikal Papua Tahun 2014-2019. Journal of Politic and Government

- Nuris, A. (2016). *Tindakan Komunikatif: Sekilas tentang Pemikiran Jürgen Habermas*. Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 1(1). <https://doi.org/10.22515/balagh.v1i1.45>
- Olifia, S., & Gora, R. (2017). *Membangun Paradigma Komunikasi Dalam Perspektif Habermas*. Jurnal Ikom Usni, Vol. 5
- Papua.go.id. (2020). *Sekilas Papua*. Papua.Go.Id. <https://www.papua.go.id/view-detail-page-254/Sekilas-Papua-.html>
- Paramitha, N. P. T. (2019). *Peralihan Model Pergerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Manfaat Strategi Non-Kekerasan Pasca Tahun 2000*. Universitas Airlangga.
- Rahman, F. M. (2019). *Tersangka Rasisme di Surabaya Minta Maaf kepada Warga Papua*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903164442-20-427216/tersangka-rasisme-di-surabaya-minta-maaf-kepada-warga-papua>
- Raymond, G. (1989). *Ide Toeri Kritis Habermas dan Mahzab Frankfurt*. Cambridge University Press.
- Reunanen, E., & Kunelius, R. (2020). *The Transformation of Communicative Power into Political Power*. In Communication Theory (Vol. 30, Issue 1). <https://doi.org/10.1093/ct/qtz011>
- Sabandar, S. (2019). *Saran Mahfud Md ke Jokowi Selesaikan Konflik Papua*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/regional/read/4049042/saran-mahfud-md-ke-jokowi-selesaikan-konflik-papua>
- Sabir, A. (2018). *Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua*. Jurnal Hubungan Internasional, 11(1). <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.8679>
- Santoso, A. (2008). *Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis dan Analisis Wacana Kritis*. Bahasa Dan Seni, 36(11).
- Saprilah. (2019). *Siswa Papua dan Nasionalisme yang Baik-Baik saja*? Blamakassar, 116. file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/283-Article Text-431-1-10-20200113.pdf

- Sari, H. P. (2020). *Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/05/11542491/peneliti-lipi-uu-otsus-berhasil-bagi-pemerintah-gagal-menurut-rakyat-papua>
- Sudira, I. N. (2017). *Dialog dalam Resolusi Konflik-Interaktif*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 12(1). <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2544.33-42>
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Sugiyatno, M. N. (2017). *Organiasasi Papua Merdeka (OPM) dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional*. In Skripsi.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suharto, T., Prasetyo, B. D., & Wulandari, M. P. (2020). *Analisis Wacana Kritis Komunikasi Verbal pada Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018*. Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi, 3(2), 43–54.
- Suryawan, I. ngurah. (2016). *Desain Besar Penataan Daerah Dan Dinamika Identitas Budaya Di Provinsi Papua Barat*. Ilmu Komunikasi.
- Suwandi, D. (2020). *Meski Turun, Angka Kemiskinan di Papua Tetap Tertinggi di Indonesia*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/15/14325061/meski-turun-angka-kemiskinan-di-papua-tetap-tertinggi-di-indonesia>
- Syarief, R., Sumardjo, ., Kriswantriyono, A., & Wulandari, Y. P. (2018). *Pengembangan Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Konflik Timika Papua*. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 22(3). <https://doi.org/10.18343/jipi/22.3.163>
- Tempo.co. 2018. *Jokowi Minta Pelaku Penembakan Papua Ditangkap, OPM Tak Gentar*. <https://nasional.tempo.co/read/1152745/jokowi-minta-pelaku-penembakan-di-papua-ditangkap-opm-tak-gentar>
- Tippe, S. (2013). *Implementasi Kebijakan Bela Negara di Perbatasan : Studi Kasus di Provinsi Papua*. Sosioteknolog, 29, 416. <https://core.ac.uk/download/pdf/295705855.pdf>

- Tryatmoko, mardyanto wahyu. (2016). *Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua*. Jurnal Penelitian Politik.
- Ulumudin. (2006). *Jurgen Habermas dan hermeneutika Kritis (Sebuah Gerakan Evolusi Sosial)*. Hunafa, 3(1).
- Urquhart, L., Brown, L., Duncanson, K., Roberts, K., & Fisher, K. (2020). *A Dialogical Approach to Understand Perspectives of an Aboriginal Wellbeing Program: An Extension of Habermas' Theory of Communicative Action*. International Journal of Qualitative Methods, 19. <https://doi.org/10.1177/1609406920957495>
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 8(1).
- Webster, D. (2001). "Already sovereign as a people": A foundational moment in West Papuan nationalism. *Pacific Affairs*, 74(4). <https://doi.org/10.2307/3557804>
- Widhana, D. H. (2019). *Siklus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua*. Tirto.Id. <https://tirto.id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA4>
- Wijaya, C. (2019). *Papua-Papua Barat : Pemerintah klaim buka pintu dialog, termasuk dengan "kelompok pro-referendum"?* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49520809>
- Yambeyapdi, E. (2019). *Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif*. Indonesian Historical Studies, 2(2). <https://doi.org/10.14710/ihis.v2i2.3749>
- Yanuarti, S. (2012). *Kemiskinan Dan Konflik Papua Di Tengah Sumber Daya Yang Melimpah*. Jurnal Penelitian Politik, 9(1).
- Zambrano Mora. (2014). *Managemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi*. 2014(June).
- Zuldin, M. (2019). *Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer*. TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial, 2(1). <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>